



**WALIKOTA MADIUN**

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA MADIUN**

**NOMOR 26 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**STANDAR BIAYA UMUM DAN STANDAR BIAYA KHUSUS**

**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN**

**TAHUN ANGGARAN 2017**

**WALIKOTA MADIUN ,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menyusun rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah berbasis prestasi kerja secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan auditabel di lingkungan Pemerintah Kota Madiun perlu adanya standar biaya ;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2017 ;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;  
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;  
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;  
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
12. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DAN STANDAR BIAYA KHUSUS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN TAHUN ANGGARAN 2017.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dokumen pelaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017.

2. Standar Biaya Khusus yang selanjutnya disingkat SBK adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu dan dokumen pelaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu Tahun Anggaran 2017.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
6. Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKPA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta perubahan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
8. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

## **Pasal 2**

Dalam rangka penyusunan perencanaan anggaran, SBU Tahun Anggaran 2017 berfungsi sebagai :

- a. batas tertinggi dalam penyusunan RKA SKPD, RKPA SKPD, DPA SKPD dan DPPA SKPD Tahun Anggaran 2017 ;
- b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya suatu aktivitas yang digunakan dalam penyusunan RKA SKPD, RKPA SKPD, DPA SKPD dan DPPA SKPD Tahun Anggaran 2017.

## **Pasal 3**

SBU Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

## **Pasal 4**

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, SBK Tahun Anggaran 2017 berfungsi sebagai :

- a. pedoman perencanaan penganggaran tahun anggaran 2017 hanya berlaku untuk SKPD tertentu yang tercantum dalam SBK ;
- b. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja SKPD dan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD Tahun Anggaran 2017 ;
- c. referensi penyusunan perkiraan maju (prognosis) ;
- d. referensi penyusunan SBK untuk keluaran (output) sejenis pada SKPD yang berbeda.

## **Pasal 5**

- (1) Dalam rangka penyusunan pelaksanaan anggaran, SBK berfungsi sebagai estimasi.
- (2) Fungsi estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prakiraan besaran biaya yang dapat dilampaui, antara lain karena perubahan komponen tahapan dan/atau penggunaan satuan biaya yang dipengaruhi harga pasar.

- (3) Besaran biaya yang dapat dilampaui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. proses pengadaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. ketersediaan alokasi anggaran ; dan
  - c. prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektifitas.
- (4) Dalam hal pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan revisi anggaran, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 6**

SBK Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

#### **Pasal 7**

Dalam rangka pelaksanaan anggaran, dapat diberikan honorarium lebih dari 1 (satu).

#### **Pasal 8**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka ketentuan yang mengatur mengenai besaran biaya/honorarium sebagaimana diatur dalam :

1. Peraturan Walikota Madiun Nomor 36 Tahun 2015 tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Biaya Akomodasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
  2. Peraturan Walikota Madiun Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
  3. Peraturan Walikota Madiun Nomor 23 Tahun 2015 tentang Honorarium Bagi Tenaga Honorer Daerah dan Tenaga Kontrak Kerja pada Pemerintah Kota Madiun
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**

pada tanggal 3 Oktober 2016

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM.**

Diundangkan di **MADIUN**  
pada tanggal 3 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**Drs. MAIDI, SH, MM, M.Pd**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19610512 198803 1 010**

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2016 NOMOR 26/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
SEKRETARIS DAERAH  
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



**BUDI WIBOWO, SH**

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001

**LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA MADIUN**  
**NOMOR : 26 TAHUN 2016**  
**TANGGAL : 3 Oktober 2016**

**SBU TAHUN ANGGARAN 2017**

NO.	URAIAN	KLASIFIKASI	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>			
<b>1.1</b>	<b>HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>			
a.	Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan Pengelola Barang Daerah		OB	4.000.000,00
b.	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD dan Pejabat Penatausahaan Barang		OB	3.000.000,00
c.	Kuasa BUD		OB	2.000.000,00
<b>1.2</b>	<b>Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen (PA/KPA/PPK)</b>			
a	PA/KPA/PPK, dengan jumlah pagu anggaran	s.d Rp. 10 miliar	OB	2.500.000,00
b	PA/KPA/PPK, dengan jumlah pagu anggaran	di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 20 miliar	OB	3.000.000,00
c	PA/KPA/PPK, dengan jumlah pagu anggaran	di atas Rp. 20 miliar	OB	3.250.000,00
d	KPA/PPK Kelurahan		OB	600.000,00
e	KPA/PPK SMP, SMA, SMK		OB	600.000,00
f	KPA/PPK SD		OB	500.000,00
g	KPA/PPK Puskesmas BLUD		OB	600.000,00
	Catatan :			
	Honor PA/KPA/PPK dapat diberikan kepada Pejabat Plt (Pelaksana Tugas)			
<b>1.3</b>	<b>Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)</b>			
a	PPK-SKPD, dengan jumlah pagu anggaran	s.d Rp. 10 miliar	OB	600.000,00
b	PPK-SKPD, dengan jumlah pagu anggaran	di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 20 miliar	OB	850.000,00
c	PPK-SKPD, dengan jumlah pagu anggaran	di atas Rp. 20 miliar	OB	1.250.000,00
<b>1.4</b>	<b>Bendahara Penerimaan</b>			
a	Bendahara Penerimaan, dengan jumlah target PAD	s.d Rp. 2,5 miliar	OB	500.000,00
b	Bendahara Penerimaan, dengan jumlah target PAD	di atas Rp. 2,5 miliar - Rp. 5 miliar	OB	600.000,00
c	Bendahara Penerimaan, dengan jumlah target PAD	di atas Rp. 5 miliar	OB	700.000,00
<b>1.5</b>	<b>Bendahara Penerimaan Pembantu</b>			
a	Bendahara Penerimaan Pembantu		OB	350.000,00
b	Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas (BLUD)		OB	400.000,00
<b>1.6</b>	<b>Bendahara Pengeluaran</b>			
a	Bendahara Pengeluaran, dengan jumlah pagu anggaran	s.d Rp. 5 miliar	OB	600.000,00
b	Bendahara Pengeluaran, dengan jumlah pagu anggaran	di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 15 miliar	OB	850.000,00
c	Bendahara Pengeluaran, dengan jumlah pagu anggaran	di atas Rp. 15 miliar	OB	1.500.000,00
<b>1.7</b>	<b>Bendahara Pengeluaran Pembantu</b>			
a	Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas		OB	500.000,00
b	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan		OB	500.000,00
c	Bendahara Pengeluaran Pembantu SD, SMP		OB	500.000,00
d	Pembantu Bendahara Pengeluaran Urusan Gaji SKPD/Unit Kerja		OB	250.000,00
e	Bendahara Pengeluaran Pembantu SMP, SMA, SMK			500.000,00
<b>1.8</b>	<b>Honorarium Pengelolaan Gaji PNS Pemerintah Kota Madiun</b>			
a	Koordinator Pembuat Daftar Gaji (PDG)		OB	1.000.000,00
b	Pembuat Daftar Gaji (PDG)		OB	850.000,00
<b>1.9</b>	<b>Honorarium Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)</b>			
a	Koordinator Verifikator SP2D		OB	1.000.000,00
b	Verifikator SP2D		OB	850.000,00

NO.	URAIAN	KLASIFIKASI	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4	5
<b>1.10</b>	<b>Honorarium Verifikator Keuangan Daerah</b>			
a	Koordinator Verifikator Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Fungsional		OB	1.000.000,00
b	Verifikator Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Fungsional		OB	850.000,00
c	Verifikator Hibah dan Bantuan Sosial		OB	850.000,00
<b>1.11</b>	<b>Penyusun Laporan Keuangan dan Verifikator pada SKPD</b>	<b>Dispendik, Dinas Kesehatan dan KB, Kecamatan</b>		
a	Penyusun Laporan Keuangan (LK) SKPD		OB	250.000,00
b	Verifikator Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pada SKPD		OB	250.000,00
c	Verifikator Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Administratif pada SKPD		OB	250.000,00
<b>1.12</b>	<b>Pembantu Bendahara Pengeluaran (PBP) Kegiatan Belanja Modal Gedung Bangunan, Modal Jalan Irigasi dan Jaringan</b>			
a	Pembantu Bendahara Pengeluaran (PBP) Kegiatan Belanja Modal Gedung Bangunan, Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	s/d Rp. 50.000.000	OK	400.000,00
b	Pembantu Bendahara Pengeluaran (PBP) Kegiatan Belanja Modal Gedung Bangunan, Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	di atas Rp. 50.000.000 - Rp. 100.000.000	OK	500.000,00
c	Pembantu Bendahara Pengeluaran (PBP) Kegiatan Belanja Modal Gedung Bangunan, Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	di atas Rp. 100.000.000 - Rp. 250.000.000	OK	650.000,00
d	Pembantu Bendahara Pengeluaran (PBP) Kegiatan Belanja Modal Gedung Bangunan, Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	di atas Rp. 250.000.000 - Rp. 500.000.000	OK	800.000,00
e	Pembantu Bendahara Pengeluaran (PBP) Kegiatan Belanja Modal Gedung Bangunan, Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	di atas Rp. 500.000.000 - Rp. 750.000.000	OK	1.000.000,00
f	Pembantu Bendahara Pengeluaran (PBP) Kegiatan Belanja Modal Gedung Bangunan, Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	di atas Rp. 750.000.000 - Rp. 1.000.000.000	OK	1.500.000,00
g	Pembantu Bendahara Pengeluaran (PBP) Kegiatan Belanja Modal Gedung Bangunan, Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	di atas Rp. 1.000.000.000 - Rp. 2.500.000.000	OK	2.250.000,00
h	Pembantu Bendahara Pengeluaran (PBP) Kegiatan Belanja Modal Gedung Bangunan, Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	di atas Rp. 2.500.000.000 - Rp. 5.000.000.000	OK	3.000.000,00
i	Pembantu Bendahara Pengeluaran (PBP) Kegiatan Belanja Modal Gedung Bangunan, Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	di atas Rp. 5.000.000.000 - Rp. 10.000.000.000	OK	4.500.000,00
j	Pembantu Bendahara Pengeluaran (PBP) Kegiatan Belanja Modal Gedung Bangunan, Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	di atas Rp. 10.000.000.000	OK	6.000.000,00
<b>1.13</b>	<b>Pembantu Bendahara Pengeluaran (PBP) Kegiatan Belanja Modal Tanah, Modal Peralatan dan Mesin, Aset tetap Lainnya, Aset Tak Berwujud</b>			
a	Pembantu Bendahara Pengeluaran (PBP) Kegiatan Belanja Modal Tanah, Modal Peralatan dan Mesin, Aset tetap Lainnya, Aset Tak Berwujud	s/d Rp. 50.000.000	OK	350.000,00
b	Pembantu Bendahara Pengeluaran (PBP) Kegiatan Belanja Modal Tanah, Modal Peralatan dan Mesin, Aset tetap Lainnya, Aset Tak Berwujud	di atas Rp. 50.000.000 - Rp. 100.000.000	OK	450.000,00
c	Pembantu Bendahara Pengeluaran (PBP) Kegiatan Belanja Modal Tanah, Modal Peralatan dan Mesin, Aset tetap Lainnya, Aset Tak Berwujud	di atas Rp. 100.000.000 - Rp. 200.000.000	OK	550.000,00
d	Pembantu Bendahara Pengeluaran (PBP) Kegiatan Belanja Modal Tanah, Modal Peralatan dan Mesin, Aset tetap Lainnya, Aset Tak Berwujud	di atas Rp. 200.000.000 - Rp. 500.000.000	OK	700.000,00
e	Pembantu Bendahara Pengeluaran (PBP) Kegiatan Belanja Modal Tanah, Modal Peralatan dan Mesin, Aset tetap Lainnya, Aset Tak Berwujud	di atas Rp. 500.000.000 - Rp. 750.000.000	OK	850.000,00
f	Pembantu Bendahara Pengeluaran (PBP) Kegiatan Belanja Modal Tanah, Modal Peralatan dan Mesin, Aset tetap Lainnya, Aset Tak Berwujud	di atas Rp. 750.000.000 - Rp. 1.000.000.000	OK	1.100.000,00
g	Pembantu Bendahara Pengeluaran (PBP) Kegiatan Belanja Modal Tanah, Modal Peralatan dan Mesin, Aset tetap Lainnya, Aset Tak Berwujud	di atas Rp. 1.000.000.000 - Rp. 2.500.000.000	OK	1.700.000,00



NO.	URAIAN	KLASIFIKASI	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4	5
h	Pembantu Bendahara Pengeluaran (PBP) Kegiatan Belanja Modal Tanah, Modal Peralatan dan Mesin, Aset tetap Lainnya, Aset Tak Berwujud	di atas Rp. 2.500.000.000 - Rp. 5.000.000.000	OK	2.400.000,00
i	Pembantu Bendahara Pengeluaran (PBP) Kegiatan Belanja Modal Tanah, Modal Peralatan dan Mesin, Aset tetap Lainnya, Aset Tak Berwujud	di atas Rp. 5.000.000.000 - Rp. 10.000.000.000	OK	3.500.000,00
j	Pembantu Bendahara Pengeluaran (PBP) Kegiatan Belanja Modal Tanah, Modal Peralatan dan Mesin, Aset tetap Lainnya, Aset Tak Berwujud	di atas Rp. 10.000.000.000	OK	5.000.000,00
<b>1.14</b>	<b>Pembantu Bendahara Pengeluaran (PBP) Kegiatan Belanja Langsung Non Belanja Modal</b>			
a	Pembantu Bendahara Pengeluaran (PBP) Kegiatan Belanja Langsung Non Belanja Modal	s/d Rp. 50.000.000	OK	300.000,00
b	Pembantu Bendahara Pengeluaran (PBP) Kegiatan Belanja Langsung Non Belanja Modal	di atas Rp. 50.000.000 - Rp. 100.000.000	OK	400.000,00
c	Pembantu Bendahara Pengeluaran (PBP) Kegiatan Belanja Langsung Non Belanja Modal	di atas Rp. 100.000.000 - Rp. 250.000.000	OK	500.000,00
d	Pembantu Bendahara Pengeluaran (PBP) Kegiatan Belanja Langsung Non Belanja Modal	di atas Rp. 250.000.000 - Rp. 500.000.000	OK	650.000,00
e	Pembantu Bendahara Pengeluaran (PBP) Kegiatan Belanja Langsung Non Belanja Modal	di atas Rp. 500.000.000 - Rp. 750.000.000	OK	750.000,00
f	Pembantu Bendahara Pengeluaran (PBP) Kegiatan Belanja Langsung Non Belanja Modal	di atas Rp. 750.000.000 - Rp. 1.000.000.000	OK	1.000.000,00
g	Pembantu Bendahara Pengeluaran (PBP) Kegiatan Belanja Langsung Non Belanja Modal	di atas Rp. 1.000.000.000 - Rp. 2.500.000.000	OK	1.350.000,00
h	Pembantu Bendahara Pengeluaran (PBP) Kegiatan Belanja Langsung Non Belanja Modal	di atas Rp. 2.500.000.000 - Rp. 5.000.000.000	OK	1.750.000,00
i	Pembantu Bendahara Pengeluaran (PBP) Kegiatan Belanja Langsung Non Belanja Modal	di atas Rp. 5.000.000.000 - Rp. 10.000.000.000	OK	2.500.000,00
j	Pembantu Bendahara Pengeluaran (PBP) Kegiatan Belanja Langsung Non Belanja Modal	di atas Rp. 10.000.000.000	OK	3.750.000,00
<b>1.15</b>	<b>Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Rutinitas Kantor</b>			
a	PPTK Belanja Rutin tiap SKPD		OB	500.000,00
b	PPTK UPTD pada Dinas Pendidikan		OB	500.000,00
c	PPTK SMP		OB	400.000,00
d	PPTK Kelurahan		OB	400.000,00
e	PPTK Puskesmas		OB	400.000,00
<b>1.16</b>	<b>PPTK Kegiatan Belanja Modal Gedung Bangunan, Modal Jalan Irigasi dan Jaringan</b>			
a	PPTK Kegiatan Belanja Modal Gedung Bangunan, Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	di atas Rp. 50.000.000 - Rp. 100.000.000	OK	1.000.000,00
b	PPTK Kegiatan Belanja Modal Gedung Bangunan, Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	di atas Rp. 100.000.000 - Rp. 200.000.000	OK	1.250.000,00
c	PPTK Kegiatan Belanja Modal Gedung Bangunan, Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	di atas Rp. 200.000.000 - Rp. 500.000.000	OK	1.500.000,00
d	PPTK Kegiatan Belanja Modal Gedung Bangunan, Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	di atas Rp. 500.000.000 - Rp. 750.000.000	OK	2.000.000,00
e	PPTK Kegiatan Belanja Modal Gedung Bangunan, Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	di atas Rp. 750.000.000 - Rp. 1.000.000.000	OK	3.000.000,00
f	PPTK Kegiatan Belanja Modal Gedung Bangunan, Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	di atas Rp. 1.000.000.000 - Rp. 2.500.000.000	OK	4.500.000,00
g	PPTK Kegiatan Belanja Modal Gedung Bangunan, Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	di atas Rp. 2.500.000.000 - Rp. 5.000.000.000	OK	6.000.000,00
h	PPTK Kegiatan Belanja Modal Gedung Bangunan, Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	di atas Rp. 5.000.000.000 - Rp. 10.000.000.000	OK	9.000.000,00
i	PPTK Kegiatan Belanja Modal Gedung Bangunan, Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	di atas Rp. 10.000.000.000	OK	12.000.000,00
<b>1.17</b>	<b>PPTK Kegiatan Belanja Modal Tanah, Modal Peralatan dan Mesin, Aset tetap Lainnya, Aset Tak Berwujud</b>			
a	PPTK Kegiatan Belanja Modal Tanah, Modal Peralatan dan Mesin, Aset tetap Lainnya, Aset Tak Berwujud	s/d Rp. 50.000.000	OK	700.000,00
b	PPTK Kegiatan Belanja Modal Tanah, Modal Peralatan dan Mesin, Aset tetap Lainnya, Aset Tak Berwujud	di atas Rp. 50.000.000 - Rp. 100.000.000	OK	900.000,00
c	PPTK Kegiatan Belanja Modal Tanah, Modal Peralatan dan Mesin, Aset tetap Lainnya, Aset Tak Berwujud	di atas Rp. 100.000.000 - Rp. 200.000.000	OK	1.100.000,00
d	PPTK Kegiatan Belanja Modal Tanah, Modal Peralatan dan Mesin, Aset tetap Lainnya, Aset Tak Berwujud	di atas Rp. 200.000.000 - Rp. 500.000.000	OK	1.350.000,00

NO.	URAIAN	KLASIFIKASI	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4	5
e	PPTK Kegiatan Belanja Modal Tanah, Modal Peralatan dan Mesin, Aset tetap Lainnya, Aset Tak Berwujud	di atas Rp. 500.000.000 - Rp. 750.000.000	OK	1.700.000,00
f	PPTK Kegiatan Belanja Modal Tanah, Modal Peralatan dan Mesin, Aset tetap Lainnya, Aset Tak Berwujud	di atas Rp. 750.000.000 - Rp. 1.000.000.000	OK	2.500.000,00
g	PPTK Kegiatan Belanja Modal Tanah, Modal Peralatan dan Mesin, Aset tetap Lainnya, Aset Tak Berwujud	di atas Rp. 1.000.000.000 - Rp. 2.500.000.000	OK	3.500.000,00
h	PPTK Kegiatan Belanja Modal Tanah, Modal Peralatan dan Mesin, Aset tetap Lainnya, Aset Tak Berwujud	di atas Rp. 2.500.000.000 - Rp. 5.000.000.000	OK	4.750.000,00
i	PPTK Kegiatan Belanja Modal Tanah, Modal Peralatan dan Mesin, Aset tetap Lainnya, Aset Tak Berwujud	di atas Rp. 5.000.000.000 - Rp. 10.000.000.000	OK	7.000.000,00
j	PPTK Kegiatan Belanja Modal Tanah, Modal Peralatan dan Mesin, Aset tetap Lainnya, Aset Tak Berwujud	di atas Rp. 10.000.000.000	OK	10.000.000,00
<b>1.18</b>	<b>Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Langsung Non Belanja Modal</b>			
a	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Langsung Non Belanja Modal	s/d Rp. 50.000.000	OK	650.000,00
b	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Langsung Non Belanja Modal	di atas Rp. 50.000.000 - Rp. 100.000.000	OK	800.000,00
c	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Langsung Non Belanja Modal	di atas Rp. 100.000.000 - Rp. 250.000.000	OK	1.000.000,00
d	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Langsung Non Belanja Modal	di atas Rp. 250.000.000 - Rp. 500.000.000	OK	1.250.000,00
e	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Langsung Non Belanja Modal	di atas Rp. 500.000.000 - Rp. 750.000.000	OK	1.500.000,00
f	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Langsung Non Belanja Modal	di atas Rp. 750.000.000 - Rp. 1.000.000.000	OK	2.000.000,00
g	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Langsung Non Belanja Modal	di atas Rp. 1.000.000.000 - Rp. 2.500.000.000	OK	2.750.000,00
h	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Langsung Non Belanja Modal	di atas Rp. 2.500.000.000 - Rp. 5.000.000.000	OK	3.500.000,00
i	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Langsung Non Belanja Modal	di atas Rp. 5.000.000.000 - Rp. 10.000.000.000	OK	5.000.000,00
j	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Langsung Non Belanja Modal	di atas Rp. 10.000.000.000	OK	7.500.000,00
<b>1.19</b>	<b>Staf Administrasi (SA) Kegiatan Fisik Konstruksi</b>			
a	SA Kegiatan Fisik Konstruksi	s/d Rp. 50.000.000	OK	200.000,00
b	SA Kegiatan Fisik Konstruksi	di atas Rp. 50.000.000 - Rp. 100.000.000	OK	250.000,00
c	SA Kegiatan Fisik Konstruksi	di atas Rp. 100.000.000 - Rp. 250.000.000	OK	300.000,00
d	SA Kegiatan Fisik Konstruksi	di atas Rp. 250.000.000 - Rp. 500.000.000	OK	400.000,00
e	SA Kegiatan Fisik Konstruksi	di atas Rp. 500.000.000 - Rp. 750.000.000	OK	500.000,00
f	SA Kegiatan Fisik Konstruksi	di atas Rp. 750.000.000 - Rp. 1.000.000.000	OK	750.000,00
g	SA Kegiatan Fisik Konstruksi	di atas Rp. 1.000.000.000 - Rp. 2.500.000.000	OK	1.100.000,00
h	SA Kegiatan Fisik Konstruksi	di atas Rp. 2.500.000.000 - Rp. 5.000.000.000	OK	1.500.000,00
i	SA Kegiatan Fisik Konstruksi	di atas Rp. 5.000.000.000 - Rp. 10.000.000.000	OK	2.250.000,00
j	SA Kegiatan Fisik Konstruksi	di atas Rp. 10.000.000.000	OK	3.000.000,00
<b>1.20</b>	<b>Petugas Lapangan Kegiatan Fisik Konstruksi</b>			
a	Petugas Lapangan Kegiatan Fisik Konstruksi	s/d Rp. 50.000.000	OK	300.000,00
b	Petugas Lapangan Kegiatan Fisik Konstruksi	di atas Rp. 50.000.000 - Rp. 100.000.000	OK	350.000,00
c	Petugas Lapangan Kegiatan Fisik Konstruksi	di atas Rp. 100.000.000 - Rp. 250.000.000	OK	400.000,00
d	Petugas Lapangan Kegiatan Fisik Konstruksi	di atas Rp. 250.000.000 - Rp. 500.000.000	OK	500.000,00
e	Petugas Lapangan Kegiatan Fisik Konstruksi	di atas Rp. 500.000.000 - Rp. 750.000.000	OK	600.000,00
f	Petugas Lapangan Kegiatan Fisik Konstruksi	di atas Rp. 750.000.000 - Rp. 1.000.000.000	OK	750.000,00
g	Petugas Lapangan Kegiatan Fisik Konstruksi	di atas Rp. 1.000.000.000 - Rp. 2.500.000.000	OK	1.100.000,00
h	Petugas Lapangan Kegiatan Fisik Konstruksi	di atas Rp. 2.500.000.000 - Rp. 5.000.000.000	OK	1.500.000,00

NO.	URAIAN	KLASIFIKASI	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4	5
i	Petugas Lapangan Kegiatan Fisik Konstruksi	di atas Rp. 5.000.000.000 - Rp. 10.000.000.000	OK	2.250.000,00
j	Petugas Lapangan Kegiatan Fisik Konstruksi	di atas Rp. 10.000.000.000	OK	3.000.000,00
<b>1.21</b>	<b>Staf Administrasi (SA) Kegiatan Fisik Non Konstruksi</b>			
a	SA Kegiatan Fisik Non Konstruksi (Barang dan Aset Tidak Berwujud)	s/d Rp. 50.000.000	OK	175.000,00
b	SA Kegiatan Fisik Non Konstruksi (Barang dan Aset Tidak Berwujud)	di atas Rp. 50.000.000 - Rp. 100.000.000	OK	225.000,00
c	SA Kegiatan Fisik Non Konstruksi (Barang dan Aset Tidak Berwujud)	di atas Rp. 100.000.000 - Rp. 250.000.000	OK	275.000,00
d	SA Kegiatan Fisik Non Konstruksi (Barang dan Aset Tidak Berwujud)	di atas Rp. 250.000.000 - Rp. 500.000.000	OK	350.000,00
e	SA Kegiatan Fisik Non Konstruksi (Barang dan Aset Tidak Berwujud)	di atas Rp. 500.000.000 - Rp. 750.000.000	OK	425.000,00
f	SA Kegiatan Fisik Non Konstruksi (Barang dan Aset Tidak Berwujud)	di atas Rp. 750.000.000 - Rp. 1.000.000.000	OK	550.000,00
g	SA Kegiatan Fisik Non Konstruksi (Barang dan Aset Tidak Berwujud)	di atas Rp. 1.000.000.000 - Rp. 2.500.000.000	OK	850.000,00
h	SA Kegiatan Fisik Non Konstruksi (Barang dan Aset Tidak Berwujud)	di atas Rp. 2.500.000.000 - Rp. 5.000.000.000	OK	1.200.000,00
i	SA Kegiatan Fisik Non Konstruksi (Barang dan Aset Tidak Berwujud)	di atas Rp. 5.000.000.000 - Rp. 10.000.000.000	OK	1.750.000,00
j	SA Kegiatan Fisik Non Konstruksi (Barang dan Aset Tidak Berwujud)	di atas Rp. 10.000.000.000	OK	2.500.000,00
<b>1.22</b>	<b>Staf Administrasi (SA) Kegiatan Non Fisik</b>			
a	SA Kegiatan Non Fisik	s/d Rp. 50.000.000	OK	150.000,00
b	SA Kegiatan Non Fisik	di atas Rp. 50.000.000 - Rp. 100.000.000	OK	200.000,00
c	SA Kegiatan Non Fisik	di atas Rp. 100.000.000 - Rp. 250.000.000	OK	250.000,00
d	SA Kegiatan Non Fisik	di atas Rp. 250.000.000 - Rp. 500.000.000	OK	300.000,00
e	SA Kegiatan Non Fisik	di atas Rp. 500.000.000 - Rp. 750.000.000	OK	400.000,00
f	SA Kegiatan Non Fisik	di atas Rp. 750.000.000 - Rp. 1.000.000.000	OK	500.000,00
g	SA Kegiatan Non Fisik	di atas Rp. 1.000.000.000 - Rp. 2.500.000.000	OK	650.000,00
h	SA Kegiatan Non Fisik	di atas Rp. 2.500.000.000 - Rp. 5.000.000.000	OK	850.000,00
i	SA Kegiatan Non Fisik	di atas Rp. 5.000.000.000 - Rp. 10.000.000.000	OK	1.250.000,00
j	SA Kegiatan Non Fisik	di atas Rp. 10.000.000.000	OK	1.750.000,00
<b>2</b>	<b>HONORARIUM PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH</b>			
<b>2.1</b>	<b>Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang / Atasan Langsung Pengurus Barang</b>			
a	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Dinas Pendidikan; Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga; Dinas Kesehatan dan KB; RSUD; Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; Dinas Lingkungan Hidup; BPKAD; Bagian Umum Sekretariat Daerah.	OB	650.000,00
b	Pejabat penatausahaan pengguna barang	Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah	OB	300.000,00
c	Pejabat Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang	SMP/SMA/SMK	OB	400.000,00
d	Pejabat Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang	Kelurahan, Puskesmas, SD, SDLB,	OB	300.000,00
e	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang / Kuasa Pengguna Barang	Selain yang disebutkan huruf a dan b di atas	OB	500.000,00
<b>2.2</b>	<b>Pengurus Pengguna Barang</b>			
a	Pengurus Pengguna Barang	Dinas Pendidikan; Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga; Dinas Kesehatan dan KB; RSUD; Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; Dinas Lingkungan Hidup; BPKAD; Bagian Umum Sekretariat Daerah.	OB	600.000,00
b	Pengurus Pengguna Barang	Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah.	OB	500.000,00
c	Pengurus barang pembantu	SMP/SMA/SMK.	OB	500.000,00
d	Pengurus barang pembantu	Kelurahan, Puskesmas, SD,	OB	400.000,00
e	Pengurus Pengguna Barang	SKPD selain yang disebutkan di atas	OB	500.000,00

NO.	URAIAN	KLASIFIKASI	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4	5
f	Pembantu Pengurus Pengguna Barang	Pembantu pengurus barang Dinas Pendidikan; Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga; Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	OB	300.000,00
<b>2.3</b>	<b>Penerima Barang</b>			
a	Penerima Barang		OK	200.000,00
<b>2.4</b>	<b>Penyimpan Barang</b>			
a	Penyimpan Barang	Dinas Pendidikan; Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga; Dinas Kesehatan dan KB; RSUD; Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; Dinas Lingkungan Hidup; BPKAD; Bagian Umum Sekretariat Daerah	OB	500.000,00
b	Penyimpan Barang	Selain yang disebutkan huruf a di atas	OB	400.000,00
	<b>Catatan :</b>			
	1. Pengurus barang tingkat Kelurahan, Puskesmas, SD dan Bagian selain Bagian Umum Sekretariat Daerah sekaligus ditunjuk sebagai penyimpan barang.			
<b>2.5</b>	<b>Honorarium Penatausahaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Madlun</b>			
a	Pengendali Penatausahaan Barang Milik Daerah		OB	1.000.000,00
b	Pengendali Pemanfaatan Barang Milik Daerah		OB	1.000.000,00
c	Verifikator Barang Milik Daerah		OB	850.000,00
d	Honorarium survey lokasi tim sertifikasi aset tanah		O/Bidang	100.000,00
<b>3</b>	<b>HONORARIUM PENGELOLAAN PENGADAAN DAN PENERIMAAN BARANG/JASA</b>			
<b>3.1</b>	<b>Pejabat Pengadaan Barang/Jasa</b>			
a	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	s/d Rp. 25.000.000	OP	200.000,00
b	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	di atas Rp.25.000.000 - Rp.50.000.000	OP	250.000,00
c	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	di atas Rp.50.000.000 - Rp.100.000.000	OP	300.000,00
d	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	di atas Rp.100.000.000 - Rp.200.000.000	OP	350.000,00
e	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dengan sistem e-purchasing	di atas Rp. 200.000.000	OP	400.000,00
f	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dengan sistem e-purchasing	di atas Rp.500.000.000 - Rp.1.000.000.000	OP	450.000,00
g	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dengan sistem e-purchasing	di atas Rp.1.000.000.000	OP	500.000,00
<b>3.2</b>	<b>Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa</b>			
a	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa	sampai dengan Rp.10.000.000	OP	100.000,00
b	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa	di atas Rp. 10.000.000 - Rp.50.000.000	OP	150.000,00
c	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa	di atas Rp. 50.000.000 - Rp.100.000.000	OP	200.000,00
d	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa	di atas Rp. 100.000.000 - Rp.200.000.000	OP	250.000,00
e	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa	di atas Rp. 200.000.000 - Rp.500.000.000	OP	350.000,00
f	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa	di atas Rp. 500.000.000 - Rp.1.000.000.000	OP	400.000,00
g	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa	di atas Rp.1.000.000.000 - Rp.2.500.000.000	OP	450.000,00
h	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa	di atas Rp. 2.500.000.000 - Rp.5.000.000.000	OP	500.000,00
i	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa	di atas Rp.5.000.000.000 - Rp.10.000.000.000	OP	550.000,00
j	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa	di atas Rp.10.000.000.000	OP	600.000,00
	<b>Catatan :</b>			
	1. Jumlah Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa lebih dari 1 orang, penganggaran sesuai dengan jumlah panitia.			
<b>4</b>	<b>Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja-ULP)</b>	<b>Bagian Administrasi Pembangunan</b>		
<b>4.1</b>	<b>Pokja-ULP Pengadaan Jasa Konstruksi</b>	<b>di atas Rp.200.000.000- Rp.500.000.000</b>		
a	Ketua		OP	850.000,00
b	Sekretaris		OP	750.000,00
c	Anggota		OP	700.000,00

NO.	URAIAN	KLASIFIKASI	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4	5
4.2	<b>Pokja-ULP Pengadaan Jasa Konstruksi</b>	<b>di atas Rp.500.000.000 - Rp.1.000.000.000</b>		
a	Ketua		OP	1.000.000,00
b	Sekretaris		OP	900.000,00
c	Anggota		OP	850.000,00
4.3	<b>Pokja-ULP Pengadaan Jasa Konstruksi</b>	<b>di atas Rp.1.000.000.000 - Rp.2.500.000.000</b>		
a	Ketua		OP	1.200.000,00
b	Sekretaris		OP	1.100.000,00
c	Anggota		OP	1.000.000,00
4.4.	<b>Pokja-ULP Pengadaan Jasa Konstruksi</b>	<b>di atas Rp.2.500.000.000 - Rp.5.000.000.000</b>		
a	Ketua		OP	1.500.000,00
b	Sekretaris		OP	1.400.000,00
c	Anggota		OP	1.300.000,00
4.5	<b>Pokja-ULP Pengadaan Jasa Konstruksi</b>	<b>di atas Rp.5.000.000.000 - Rp.10.000.000.000</b>		
a	Ketua		OP	1.700.000,00
b	Sekretaris		OP	1.600.000,00
c	Anggota		OP	1.500.000,00
4.6	<b>Pokja-ULP Pengadaan Jasa Konstruksi</b>	<b>di atas Rp.10.000.000.000 - Rp. 25.000.000.000</b>		
a	Ketua		OP	2.100.000,00
b	Sekretaris		OP	2.000.000,00
c	Anggota		OP	1.900.000,00
4.7	<b>Pokja-ULP Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya (Non Konstruksi)</b>	<b>di atas Rp.200.000.000 - Rp.500.000.000</b>		
a	Ketua		OP	700.000,00
b	Sekretaris		OP	600.000,00
c	Anggota		OP	550.000,00
4.8	<b>Pokja-ULP Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya (Non Konstruksi)</b>	<b>di atas Rp.500.000.000 - Rp.1.000.000.000</b>		
a	Ketua		OP	900.000,00
b	Sekretaris		OP	800.000,00
c	Anggota		OP	750.000,00
4.9	<b>Pokja-ULP Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya (Non Konstruksi)</b>	<b>di atas Rp.1.000.000.000 - Rp.2.500.000.000</b>		
a	Ketua		OP	1.100.000,00
b	Sekretaris		OP	1.000.000,00
c	Anggota		OP	950.000,00
4.10	<b>Pokja-ULP Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya (Non Konstruksi)</b>	<b>di atas Rp.2.500.000.000 - Rp.5.000.000.000</b>		
a	Ketua		OP	1.300.000,00
b	Sekretaris		OP	1.200.000,00
c	Anggota		OP	1.100.000,00
4.11	<b>Pokja-ULP Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya (Non Konstruksi)</b>	<b>di atas Rp.5.000.000.000 - Rp.10.000.000.000</b>		
a	Ketua		OP	1.500.000,00
b	Sekretaris		OP	1.400.000,00
c	Anggota		OP	1.300.000,00
4.12	<b>Pokja-ULP Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya (Non Konstruksi)</b>	<b>di atas Rp.10.000.000.000 - Rp. 25.000.000.000</b>		
a	Ketua		OP	1.700.000,00
b	Sekretaris		OP	1.600.000,00
c	Anggota		OP	1.500.000,00
4.13	<b>Pokja-ULP Pengadaan Jasa Konsultansi</b>	<b>di atas Rp. 50.000.000 - Rp. 200.000.000</b>		
a	Ketua		OP	450.000,00
b	Sekretaris		OP	400.000,00
c	Anggota		OP	350.000,00
4.14	<b>Pokja-ULP Pengadaan Jasa Konsultansi</b>	<b>di atas Rp.200.000.000 - Rp. 500.000.000</b>		
a	Ketua		OP	500.000,00
b	Sekretaris		OP	450.000,00
c	Anggota		OP	400.000,00

NO.	URAIAN	KLASIFIKASI	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4	5
4.15	<b>Pokja-ULP Pengadaan Jasa Konsultansi</b>	di atas Rp.500.000.000 - Rp. 1.000.000.000		
a	Ketua		OP	700.000,00
b	Sekretaris		OP	600.000,00
c	Anggota		OP	550.000,00
4.16	<b>Pokja-ULP Pengadaan Jasa Konsultansi</b>	di atas Rp. 1.000.000.000		
a	Ketua		OP	900.000,00
b	Sekretaris		OP	800.000,00
c	Anggota		OP	750.000,00
4.17	<b>Pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP)</b>	<b>Bag Administrasi Pembangunan</b>		
a	Kepala ULP		OB	500.000,00
b	Sekretaris		OB	300.000,00
c	Staf Administrasi		OB	200.000,00
5	<b>HONORARIUM TIM/PANITIA PENGARAH (Steering Committee)</b>			
5.1	<b>Tim/Panitia Pengarah (Steering Committee) dengan SK Walikota</b>	<b>Pagu Kegiatan s.d 500 Juta</b>		
a	Pelindung, setingkat Walikota		OK	5.000.000,00
b	Pembina, setingkat Wakil Walikota		OK	3.000.000,00
c	Penanggung Jawab, setingkat Sekretaris Daerah		OK	2.500.000,00
d	Koordinator, setingkat Asisten, Kepala SKPD		OK	2.000.000,00
e	Anggota, setingkat Eselon III, IV atau staf		OK	1.500.000,00
5.2	<b>Tim/Panitia Pengarah (Steering Committee) dengan SK Walikota</b>	<b>Pagu Kegiatan di atas 500 Juta s.d 1 milliar</b>		
a	Pelindung, setingkat Walikota		OK	7.500.000,00
b	Pembina, setingkat Wakil Walikota		OK	5.000.000,00
c	Penanggung Jawab, setingkat Sekretaris Daerah		OK	4.000.000,00
d	Koordinator, setingkat Asisten, Kepala SKPD		OK	3.000.000,00
e	Anggota, setingkat Eselon III, IV atau staf		OK	2.000.000,00
5.3	<b>Tim/Panitia Pengarah (Steering Committee) dengan SK Walikota</b>	<b>Pagu Kegiatan diatas 1 milliar</b>		
a	Pelindung, setingkat Walikota		OK	10.000.000,00
b	Pembina, setingkat Wakil Walikota		OK	7.500.000,00
c	Penanggung Jawab, setingkat Sekretaris Daerah		OK	5.000.000,00
d	Koordinator, setingkat Asisten, Kepala SKPD		OK	4.000.000,00
e	Anggota, setingkat Eselon III, IV atau staf		OK	3.000.000,00
	<b>Catatan :</b>			
	Penggunaan honorarium tim/panitia pengarah (steering committee) dengan SK Walikota hanya untuk kegiatan yang memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :			
	1. Kegiatan yang sifatnya koordinatif antar SKPD atau antar instansi vertikal atau antar lembaga daerah.			
	2. Kegiatan minimal berskala tingkat kota atau provinsi atau nasional.			
	3. Membutuhkan koordinasi untuk pengambilan keputusan walikota.			
	4. Kegiatan yang sifat koordinasinya cukup di SKPD yang bersangkutan tidak diperkenankan mengalokasikan honorarium tim/panitia pengarah dengan SK Walikota.			
	5. Selektif hanya untuk kegiatan yang memenuhi kriteria dengan mempertimbangkan efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran.			
	contoh : kegiatan hari jadi Kota Madiun, kegiatan perlombaan tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, kegiatan penyusunan perda.			
5.4	<b>Tim/Panitia Pengarah (Steering Committee) dengan SK PA/KPA</b>	<b>Pagu Kegiatan s.d 200 jt</b>		
a	Penanggung Jawab, setingkat Ka. SKPD		OK	3.000.000,00
b	Koordinator, setingkat Eselon III/ IV/ V		OK	2.000.000,00
c	Anggota, setingkat Staf		OK	1.000.000,00

NO.	URAIAN	KLASIFIKASI	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4	5
5.5	<b>Tim/Panitia Pengarah (Steering Committee) dengan SK PA/KPA</b>	<b>Pagu Kegiatan diatas 200 jt s.d 350 jt</b>		
a	Penanggung Jawab, setingkat Ka. SKPD		OK	4.000.000,00
b	Koordinator, setingkat Eselon III/ IV/ V		OK	3.000.000,00
c	Anggota, setingkat Staf		OK	2.000.000,00
5.6	<b>Tim/Panitia Pengarah (Steering Committee) dengan SK PA/KPA</b>	<b>Pagu Kegiatan diatas 350 jt</b>		
a	Penanggung Jawab, setingkat Ka. SKPD		OK	5.000.000,00
b	Koordinator, setingkat Eselon III/ IV/ V		OK	4.000.000,00
c	Anggota, setingkat Staf		OK	3.000.000,00
	Catatan :			
	Penggunaan honorarium tim/panitia pengarah (steering committee) dengan SK PA/KPA hanya untuk kegiatan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :			
	1. Kegiatan yang sifatnya koordinatif antar SKPD atau antar bidang SKPD yang bersangkutan.			
	2. Kegiatan hanya berskala SKPD atau kelurahan atau kecamatan.			
	3. Membutuhkan koordinasi antar bidang untuk pengambilan keputusan PA/KPA.			
	4. Selektif hanya untuk kegiatan yang memenuhi kriteria dengan mempertimbangkan efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran.			
	contoh : kegiatan bintek, penyusunan renja SKPD.			
5.7	<b>HONORARIUM TIM/PANITIA PELAKSANAN/SEKRETARIAT (Operating Committee)</b>			
a	Ketua/Koordinator/Pimpinan		OH	350.000,00
b	Wakil Ketua/Koordinator/ Pimpinan		OH	250.000,00
c	Ketua Seksi		OH	200.000,00
d	Anggota		OH	150.000,00
e	Operator presentasi (proyektor)		OH	75.000,00
f	Operator Teknis (Sound system, dsb)		OH	75.000,00
g	Petugas Kebersihan		OH	50.000,00
h	Petugas Keamanan		OH	50.000,00
i	Petugas Parkir		OH	50.000,00
j	Petugas Ketertiban		OH	50.000,00
k	Petugas Pengatur Lalu Lintas		OH	50.000,00
l	Petugas Penata Kelas / Ruang		OH	50.000,00
m	Pembawa Acara		OH	100.000,00
n	Petugas Protokol		OH	100.000,00
o	Pembaca Doa		OH	100.000,00
6	<b>HONORARIUM PENGAJAR/ NARASUMBER/PAKAR/ TENAGA AHLI/ INSTRUKTUR/MODERATOR</b>			
6.1	<b>HONORARIUM PENGAJAR/NARASUMBER/PAKAR/TENAGA AHLI/INSTRUKTUR/MODERATOR</b>			
a	Menteri/Setingkat Menteri/Walikota/ Wakil Walikota/ yang disetarakan		OJ	1.700.000,00
b	Pejabat Eselon I/ yang disetarakan		OJ	1.400.000,00
c	Pejabat Eselon II/ yang disetarakan		OJ	1.000.000,00
d	Pejabat Eselon III/ yang disetarakan		OJ	900.000,00
e	Pejabat Eselon IV/ yang disetarakan, dan Staf		OJ	700.000,00
f	Pakar/Praktisi/Akademisi/ Pembicara Khusus		OJ	1.500.000,00
g	Moderator setingkat Eselon I		OH	750.000,00
h	Moderator setingkat Eselon II		OH	650.000,00
i	Moderator setingkat Eselon III		OH	500.000,00
j	Moderator setingkat Eselon IV ke bawah		OH	350.000,00
k	Pengajar/Widya Iswara		OJ	200.000,00
l	Instruktur/Pelatih		OJ	150.000,00
	Catatan :			
	1. Honorarium pengajar/penatar/instruktur/nara sumber/Pakar/Tenaga Ahli dan moderator untuk kegiatan bintek, sosialisasi, pelatihan, seminar, dialog interaktif siaran radio/televisi, serta sejenis.			
6.2	<b>HONORARIUM PENYUSUN MATERI/NASKAH</b>			
a	Penyusun Materi, s.d 50 halaman		OK	200.000,00
b	Penyusun Materi, 51 s.d 100 halaman		OK	500.000,00
c	Penyusun Materi, 101 halaman lebih		OK	750.000,00

NO.	URAIAN	KLASIFIKASI	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4	5
	Catatan :			
	1. Honorarium penyusun materi/naskah dalam bentuk slide untuk kegiatan bimtek, sosialisasi, pelatihan, seminar, atau sejenisnya.			
7	HONORARIUM TIM TP/TGR PEMERINTAH KOTA MADIUN			
7.1	HONORARIUM TIM TP/TGR PEMERINTAH KOTA MADIUN			
a	Ketua Tim		OK	2.000.000,00
b	Wakil Ketua		OK	1.750.000,00
c	Sekretaris		OK	1.500.000,00
d	Anggota		OK	1.000.000,00
8	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH KOTA MADIUN			
8.1	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH KOTA MADIUN			
a	Pembina 1		OB	6.000.000,00
b	Pembina 2		OB	4.000.000,00
c	Ketua		OB	3.500.000,00
d	Sekretaris I		OB	3.000.000,00
e	Sekretaris II		OB	2.500.000,00
f	Anggota		OB	2.000.000,00
	Catatan :			
	1. Honorarium Tim Anggaran dimasukkan dalam kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor BPKAD Kota Madiun.			
	2. Honorarium Tim Anggaran tidak diperkenankan dimasukkan dalam kegiatan selain tersebut dalam catatan nomor 1.			
9	HONORARIUM PENGELOLA APLIKASI SISTEM INFORMASI			
9.1	HONORARIUM PENGELOLA APLIKASI SISTEM INFORMASI			
a	Sistem Analis		OK	8.000.000,00
b	Programmer Senior		OK	7.500.000,00
c	Admin Sistem dan Database		OB	2.000.000,00
d	Admin Jaringan		OB	1.000.000,00
e	Admin Aplikasi		OB	1.500.000,00
f	Implementator		OK	500.000,00
g	Implementator		OB	1.300.000,00
h	Implementator		OH	50.000,00
i	Operator/Entry Data		OK	1.000.000,00
j	Operator/Entry Data		OB	1.000.000,00
k	Operator/Entry Data		OH	80.000,00
l	Teknisi jaringan		OB	500.000,00
	Catatan:			
	1. Jika Kegiatan membutuhkan waktu lebih dari 19 hari, maka menggunakan satuan Honor Orang Bulan			
10	HONORARIUM PENYUSUN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD			
10.1	HONORARIUM PENYUSUN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD			
a	Kasubbag Perencanaan selaku Koordinator		OB	500.000,00
b	Anggota		OB	250.000,00
	Catatan :			
	1. Anggota maksimal 2 orang			
11	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN DOKUMEN			
11.1	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN DOKUMEN			
a	Penanggungjawab		OK	3.000.000,00
b	Ketua Tim		OK	2.750.000,00
c	Wakil Ketua		OK	2.500.000,00
d	Sekretaris		OK	2.250.000,00
e	Anggota		OK	2.000.000,00



NO.	URAIAN	KLASIFIKASI	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4	5
	Catatan :			
	1. Kegiatan penyusunan dokumen menghasilkan output produk yang tertulis atau tercetak yang mempunyai keterangan-keterangan dipilih untuk di kumpulkan, disusun, di sediakan atau untuk disebarakan.			
	2. Dokumen berisi informasi mengenai rencana strategis, evaluasi terhadap hasil dan dampak pelaksanaan program, analisis tentang perkembangan/kemajuan dan juga masalah yang dihadapi.			
	Contoh : penyusunan standar satuan harga barang; penyusunan analisa harga satuan, penyusunan kajian, penyusunan evaluasi, survey, dan sejenisnya.			
12	<b>HONORARIUM KEGIATAN CEREMONIAL/UPACARA</b>			
12.1	<b>HONORARIUM KEGIATAN CEREMONIAL/UPACARA</b>			
a	Honorarium Petugas Pramusaji		OK	100.000,00
b	Honorarium MC. Hiburan / Jalan Sehat / Pawai diluar Protokol		OK	250.000,00
c	Honorarium Pengatur Barisan Acara / Kegiatan		OK	100.000,00
d	Honorarium Petugas Upacara (Inspektur Upacara)		OK	350.000,00
e	Honorarium Petugas Upacara (Cadangan Inspektur Upacara)		OK	250.000,00
f	Honorarium Petugas Upacara (Perwira Upacara)		OK	200.000,00
g	Honorarium Petugas Upacara (Cadangan Perwira Upacara)		OK	150.000,00
h	Honorarium Petugas Upacara (Perwira Keamanan)		OK	150.000,00
i	Honorarium Petugas Upacara (Cadangan Perwira Keamanan)		OK	100.000,00
j	Honorarium Komandan Upacara		OK	150.000,00
k	Honorarium Cadangan Komandan Upacara		OK	100.000,00
l	Honorarium Pembaca Undang-undang Dasar		OK	100.000,00
m	Honorarium Pengibar Bendera		OK	100.000,00
m	Petugas Drumb Band		OK	100.000,00
o	Panitia Upacara		OK	150.000,00
p	Petugas Koor		OK	100.000,00
q	Petugas Pagar Betis / Pagar Ayu / Pagar Bagus		OK	100.000,00
13	<b>HONORARIUM TENAGA KONTRAK (Non PNS) DAN UPAH HARIAN</b>			
13.1	<b>HONORARIUM TENAGA KONTRAK (Non PNS) DAN UPAH HARIAN</b>			
a	Honorer Daerah atau Tenaga Kontrak Kerja	Ijazah SD atau sederajat	OB	1.250.000,00
b	Honorer Daerah atau Tenaga Kontrak Kerja	Ijazah SLTP atau sederajat	OB	1.300.000,00
c	Honorer Daerah atau Tenaga Kontrak Kerja	Ijazah SLTA atau sederajat	OB	1.350.000,00
d	Honorer Daerah atau Tenaga Kontrak Kerja	Yang ditugaskan sebagai petugas khusus antara lain : Petugas Penguji Kendaraan Bermotor, Petugas Pengangkut Sampah, Tenaga Kebersihan Kantor, Pasukan Kuning, Tenaga Pengamanan, Pengemudi, Tenaga Pemulasaraan Jenazah, Tenaga Laundry pada RSUD. Kurir	OB	1.400.000,00
e	Tenaga Kontrak Kerja	Yang ditugaskan sebagai Guru, Bidan, Perawat dan Analis Kesehatan dengan pendidikan DIII	OB	1.450.000,00
f	Tenaga Kontrak Kerja	Yang ditugaskan sebagai Guru atau Paramedis dengan pendidikan Sarjana atau sederajat	OB	1.500.000,00
g	Tenaga Kontrak Kerja	Yang ditugaskan sebagai Tenaga Medis Dokter atau Apoteker dengan pendidikan Dokter atau Apoteker	OB	1.800.000,00
13.2	<b>UPAH / JASA PEKERJA LEPAS</b>			
a	Upah Harian Tenaga kebersihan		OH	70.000,00
b	Upah Tenaga Kebersihan/Tenaga Pengamanan		OB	1.000.000,00
c	Upah Harian Tenaga Serabutan		OH	70.000,00
d	Modin Kematian		OB	500.000,00
e	Upah Tenaga Trampil Tehnologi Informasi		OB	1.500.000,00
f	Upah Tenaga Trampil Kesehatan		OB	1.500.000,00
g	Upah Tenaga Trampil Akuntansi		OB	1.500.000,00
h	Sopir		OK	75.000,00
i	Upah Surveyor		Responden	5.000,00
j	Upah Entri Data		Responden	1.000,00

NO.	URAIAN	KLASIFIKASI	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4	5
k	Honor pengolah data		OK	750.000,00
l	Honor Supervisor survey		OK	500.000,00
<b>14</b>	<b>TUNJANGAN PERBAIKAN DAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PNS</b>			
<b>14.1</b>	<b>Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi PNS :</b>			
a	Pejabat Struktural Eselon II a		OB	6.000.000,00
b	Pejabat Struktural Eselon II b		OB	3.500.000,00
c	Pejabat Struktural Eselon IIb staf ahli		OB	2.700.000,00
d	Pejabat Struktural Eselon III Kepala SKPD		OB	2.500.000,00
e	Pejabat Struktural Eselon III		OB	1.700.000,00
f	Pejabat Struktural Eselon IV		OB	1.350.000,00
g	Pejabat Struktural Eselon V		OB	1.150.000,00
h	Staf PNS		OB	1.000.000,00
i	Pengawas Sekolah belum sertifikasi		OB	1.000.000,00
j	Pengawas Sekolah sertifikasi		OB	450.000,00
k	Tenaga Pengajar/ Guru belum sertifikasi		OB	1.000.000,00
l	Tenaga Pengajar/ Guru sertifikasi		OB	450.000,00
<b>14.2</b>	<b>Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Bagi PNS (yang diberikan 1 Tahun sekali)</b>			
a	Pejabat Struktural Eselon Ila		Per Tahun	6.000.000,00
b	Pejabat Struktural Eselon IIb		Per Tahun	3.500.000,00
c	Pejabat Struktural Eselon IIb staf ahli		Per Tahun	2.700.000,00
d	Pejabat Struktural Eselon III kepala SKPD		Per Tahun	2.500.000,00
e	Pejabat Struktural Eselon III		Per Tahun	1.700.000,00
f	Pejabat Struktural Eselon IV		Per Tahun	1.350.000,00
g	Pejabat Struktural Eselon V		Per Tahun	1.150.000,00
h	Staf PNS		Per Tahun	1.000.000,00
i	Pengawas Sekolah belum sertifikasi		Per Tahun	1.000.000,00
j	Pengawas Sekolah sertifikasi		Per Tahun	450.000,00
k	Tenaga Pengajar/ Guru belum sertifikasi		Per Tahun	1.000.000,00
l	Tenaga Pengajar/ Guru sertifikasi		Per Tahun	450.000,00
<b>14.3</b>	<b>Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi PNS</b>			
a	Ajudan Walikota		OB	500.000,00
b	Pengurus Rumah Dinas Walikota		OB	500.000,00
c	Ajudan Wakil Walikota		OB	400.000,00
d	Sekretaris Pribadi Walikota		OB	400.000,00
e	Sekretaris Pribadi Wakil Walikota		OB	350.000,00
f	Sekretaris Pribadi Sekretaris Daerah		OB	350.000,00
g	Pengemudi Walikota, Wakil Walikota, dan Sekretaris Daerah		OB	200.000,00
h	Satpam/Tenaga Keamanan Rumah Dinas Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah		OB	250.000,00
i	Petugas Kebersihan Rumah Dinas Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah		OB	200.000,00
j	Koordinator Pengamanan dan Kebersihan Kantor Sekretariat Daerah		OB	250.000,00
k	Kurir/Petugas Pengantar Surat pada Sekretariat Daerah		OB	250.000,00
l	Petugas Kurir/Pengantar Surat di SKPD		OB	250.000,00
m	Petugas Kearsipan di SKPD		OB	250.000,00
n	Pegawai yang bertugas di Tempat Pembuangan Akhir		OB	300.000,00
o	Petugas Sandi dan Telekomunikasi ( Santel)		OB	300.000,00
<b>15</b>	<b>UPAH TAMBAHAN BAGI NON PNS</b>			
<b>15.1</b>	<b>UPAH TAMBAHAN BAGI NON PNS</b>			
a	Ajudan Walikota		OB	500.000,00
b	Pengurus Rumah Dinas Walikota		OB	500.000,00
c	Ajudan Wakil Walikota		OB	400.000,00
d	Sekretaris Pribadi Walikota		OB	400.000,00
e	Sekretaris Pribadi Wakil Walikota		OB	350.000,00
f	Sekretaris Pribadi Sekretaris Daerah		OB	350.000,00
g	Pengemudi Walikota, Wakil Walikota, dan Sekretaris Daerah		OB	200.000,00
h	Satpam/Tenaga Keamanan Rumah Dinas Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah		OB	250.000,00
i	Petugas Kebersihan Rumah Dinas Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah		OB	200.000,00
j	Koordinator Pengamanan dan Kebersihan Kantor Sekretariat Daerah		OB	250.000,00
k	Kurir/Petugas Pengantar Surat pada Sekretariat Daerah		OB	250.000,00
l	Petugas Sandi dan Telekomunikasi (Santel)		OB	250.000,00
m	Honorarium Full Timer Panti PKK		OB	250.000,00
n	Petugas Kurir/Pengantar Surat di SKPD		OB	250.000,00
o	Petugas Kearsipan di SKPD		OB	250.000,00
p	Pegawai yang bertugas di Tempat Pembuangan Akhir		OB	300.000,00

NO.	URAIAN	KLASIFIKASI	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4	5
16	<b>BESARAN HADIAH PERLOMBAAN DAN HONORARIUM WASIT/JURI</b>			
16.1	<b>Klasifikasi Perlombaan Bidang Non Akademik</b>			
	<b>Bidang Olahraga</b>			
a	Tingkat Kelurahan	Perorangan	Paket	5.000.000,00
b	Tingkat Kecamatan	Perorangan	Paket	10.000.000,00
c	Tingkat Kota	Perorangan	Paket	15.000.000,00
d	Tingkat Kelurahan	Beregu	Paket	10.000.000,00
e	Tingkat Kecamatan	Beregu	Paket	20.000.000,00
f	Tingkat Kota	Beregu	Paket	30.000.000,00
16.2	<b>Bidang Seni dan Budaya</b>			
a	Tingkat Kelurahan	Perorangan	Paket	4.000.000,00
b	Tingkat Kecamatan	Perorangan	Paket	8.000.000,00
c	Tingkat Kota	Perorangan	Paket	12.000.000,00
d	Tingkat Kelurahan	Beregu	Paket	6.000.000,00
e	Tingkat Kecamatan	Beregu	Paket	12.000.000,00
f	Tingkat Kota	Beregu	Paket	18.000.000,00
16.3	<b>Bidang Umum</b>	<b>(Perlombaan Posyandu, Balita, Perpustakaan, Kader, Dokter Kecil, TTG, Memasak, dan sejenisnya)</b>		
a	Tingkat Kelurahan	Perorangan	Paket	3.000.000,00
b	Tingkat Kecamatan	Perorangan	Paket	4.000.000,00
c	Tingkat Kota	Perorangan	Paket	5.000.000,00
d	Tingkat Kelurahan	Beregu	Paket	5.000.000,00
e	Tingkat Kecamatan	Beregu	Paket	7.000.000,00
f	Tingkat Kota	Beregu	Paket	10.000.000,00
16.4	<b>Bidang Khusus</b>	<b>(Perlombaan antar Kelurahan, Kebersihan, Lingkungan, Capaian Target PBB, Pawai Pembangunan)</b>		
a	Tingkat Kelurahan		Paket	10.000.000,00
b	Tingkat Kecamatan		Paket	20.000.000,00
c	Tingkat Kota		Paket	50.000.000,00
16.5	<b>Klasifikasi Perlombaan Bidang Akademik</b>			
	<b>Bidang Akademik Tingkat Kecamatan</b>			
a	Tingkat PAUD	Perorangan	Paket	1.000.000,00
b	Tingkat PAUD	Beregu	Paket	3.000.000,00
c	Tingkat SD/MI	Perorangan	Paket	2.000.000,00
d	Tingkat SD/MI	Beregu	Paket	7.000.000,00
e	Tingkat SMP/MTS/ SMA/SMK/MA	Perorangan	Paket	3.500.000,00
f	Tingkat SMP/MTS/ SMA/SMK/MA	Beregu	Paket	10.000.000,00
16.6	<b>Bidang Akademik Tingkat Kota</b>			
a	Tingkat PAUD	Perorangan	Paket	1.500.000,00
b	Tingkat PAUD	Beregu	Paket	5.000.000,00
c	Tingkat SD/MI	Perorangan	Paket	2.500.000,00
d	Tingkat SD/MI	Beregu	Paket	10.000.000,00
e	Tingkat SMP/MTS/ SMA/SMK/MA	Perorangan	Paket	5.000.000,00
f	Tingkat SMP/MTS/ SMA/SMK/MA	Beregu	Paket	15.000.000,00
16.7	<b>Honor Wasit/Juri</b>			
a	Wasit/Juri Per Paket Pertandingan	Olah Raga	Per pertandingan/ Event	300.000,00
b	Wasit/Juri Perorangan	Olah Raga	Per pertandingan/ Event	50.000,00
c	Jasa Juri Profesional / Juri Propinsi	Non Olah Raga	OH	1.000.000,00
d	Jasa Juri Internal Pemda	Non Olah Raga	OH	350.000,00
<b>II. UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN</b>				
17	<b>STANDAR UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR PNS DAN NON PNS HARI KERJA</b>			
17.1	<b>Standar Uang Makan Lembur PNS dan Pegawai Tidak Tetap</b>			
a	Makanan Dan Minuman Untuk Lembur		OH Lembur	25.000,00
17.2	<b>Standar Uang Lembur PNS dan Pegawai Tidak Tetap (Hari Kerja Efektif)</b>	<b>2 Jam pertama</b>		
a	Pegawai Eselon II		OJ	23.000,00
b	Pegawai Eselon III		OJ	20.000,00
c	Pegawai Eselon IV		OJ	17.000,00
d	Pegawai Eselon V		OJ	15.000,00
e	Pegawai Bukan Pemangku Jabatan		OJ	13.000,00
f	Pegawai Tidak Tetap		OJ	10.000,00
	Catatan :			

NO.	URAIAN	KLASIFIKASI	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4	5
	1. Uang lembur 2 jam pertama tidak diberikan uang makan lembur.			
<b>17.3</b>	<b>Standar Uang Lembur PNS dan Pegawai Tidak Tetap (Hari Kerja Efektif)</b>	<b>2 jam kedua</b>		
a	Pegawai Eselon II		OJ	46.000,00
b	Pegawai Eselon III		OJ	40.000,00
c	Pegawai Eselon IV		OJ	34.000,00
d	Pegawai Eselon V		OJ	30.000,00
e	Pegawai Bukan Pemangku Jabatan		OJ	26.000,00
f	Pegawai Tidak Tetap		OJ	20.000,00
	Catatan :			
	1. Uang lembur 2 jam kedua diberikan naik 100% dari 2 jam pertama.			
	2. Uang lembur 2 jam kedua sudah termasuk uang makan lembur.			
<b>17.4</b>	<b>Standar Uang Lembur PNS dan Pegawai Tidak Tetap (Hari Kerja Efektif)</b>	<b>2 jam ketiga</b>		
a	Pegawai Eselon II		OJ	92.000,00
b	Pegawai Eselon III		OJ	80.000,00
c	Pegawai Eselon IV		OJ	68.000,00
d	Pegawai Eselon V		OJ	60.000,00
e	Pegawai Bukan Pemangku Jabatan		OJ	52.000,00
f	Pegawai Tidak Tetap		OJ	40.000,00
	Catatan :			
	1. Uang lembur 2 jam ketiga diberikan naik 100% dari 2 jam kedua.			
	2. Uang lembur sudah termasuk uang makan lembur.			
	3. Uang lembur diberikan maksimal 6 jam dalam 1 hari kerja efektif.			
<b>17.5</b>	<b>Standar Uang Lembur PNS dan Pegawai Tidak Tetap (Hari Libur/Besar)</b>			
a	Pegawai Eselon II		OJ	46.000,00
b	Pegawai Eselon III		OJ	40.000,00
c	Pegawai Eselon IV		OJ	34.000,00
d	Pegawai Eselon V		OJ	30.000,00
e	Pegawai Bukan Pemangku Jabatan		OJ	26.000,00
f	Pegawai Tidak Tetap		OJ	20.000,00
	Catatan :			
	1. Lembur lebih dari 5 jam diberikan uang makan lembur @ Rp. 25.000.			
	2. Uang makan lembur diberikan dalam bentuk uang dipotong PPh 21 sesuai ketentuan yang berlaku.			
<b>III. PERJALANAN DINAS</b>				
<b>18</b>	<b>BIAYA AKOMODASI PERJALANAN DINAS</b>			
<b>18.1</b>	<b>BIAYA TRANSPORTASI DARAT PULANG PERGI (batas maksimal) DALAM NEGERI Pejabat Negara, Es II, III, IV, V, Gol IV, III, II, I, PTT, GTT</b>			
	<b>Provinsi Jawa Timur</b>			
1	Ngawi, Magetan, Kab. Madiun, Ponorogo	Pejabat Negara, Es II, III, IV, V, Gol IV, III, II, I, PTT, GTT	PP	200.000,00
2	Pacitan	Pejabat Negara, Es II, III, IV, V, Gol IV, III, II, I, PTT, GTT	PP	400.000,00
3	Nganjuk, Trenggalek, Tulungagung, Kediri, Blitar	Pejabat Negara, Es II, III, IV, V, Gol IV, III, II, I, PTT, GTT	PP	300.000,00
4	Jombang, Mojokerto, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan	Pejabat Negara, Es II, III, IV, V, Gol IV, III, II, I, PTT, GTT	PP	1.000.000,00
5	Malang, Batu, Lumajang	Pejabat Negara, Es II, III, IV, V, Gol IV, III, II, I, PTT, GTT	PP	900.000,00
6	Jember, Situbondo, Bondowoso, Probolinggo, Banyuwangi	Pejabat Negara, Es II, III, IV, V, Gol IV, III, II, I, PTT, GTT	PP	1.500.000,00
7	Sampang, Bangkalan, Pamekasan, Sumenep	Pejabat Negara, Es II, III, IV, V, Gol IV, III, II, I, PTT, GTT	PP	900.000,00
	<b>Provinsi Jawa Tengah</b>			
8	Sragen, Wonogiri, Solo, Karanganyar, Boyolali, Temanggung, Wonosobo, Klaten, Magelang, Purworejo, Rembang, Kebumen, Peralang, Semarang, Blora, Pati, Kendal, Kudus, Demak, Jepara, Grobogan, Pekalongan, Tegal, Brebes, Cilacap, Batang, Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga.	Pejabat Negara, Es II, III, IV, V, Gol IV, III, II, I, PTT, GTT	PP	1.000.000,00

NO.	URAIAN	KLASIFIKASI	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4	5
	<b>Provinsi DI Yogyakarta</b>			
9	Yogyakarta, Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul, Bantul	Pejabat Negara, Es II, III, IV, V, Gol IV, III, II, I, PTT, GTT	PP	1.000.000,00
	<b>Provinsi Jawa Barat</b>			
10	Indramayu, Cirebon, Karawang, Kuningan, Majalengka, Purwakarta, Subang, Ciamis, Tasikmalaya, Cimahi, Bandung, Sumedang, Sukabumi, Garut, Cianjur, Bekasi, Boor. Depok	Pejabat Negara, Es II, III, IV, V, Gol IV, III, II, I, PTT, GTT	PP	1.300.000,00
	<b>Provinsi Banten</b>			
11	Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang, Cilegon	Pejabat Negara, Es II, III, IV, V, Gol IV, III, II, I, PTT, GTT	PP	1.300.000,00
	<b>Provinsi DKI Jakarta</b>			
12	Jakarta	Pejabat Negara, Es II, III, IV, V, Gol IV, III, II, I, PTT, GTT	PP	1.300.000,00
<b>18.2</b>	<b>BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (PP) BISNIS</b>			
1	JAKARTA	AMBON	PP	13.285.000,00
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	PP	7.412.000,00
3	JAKARTA	BANDA ACEH	PP	7.519.000,00
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	PP	2.407.000,00
5	JAKARTA	BANJARMASIN	PP	5.252.000,00
6	JAKARTA	BATAM	PP	4.867.000,00
7	JAKARTA	BENGKULU	PP	4.364.000,00
8	JAKARTA	BIAK	PP	14.065.000,00
9	JAKARTA	DENPASAR	PP	5.305.000,00
10	JAKARTA	GORONTALO	PP	7.231.000,00
11	JAKARTA	JAMBI	PP	4.065.000,00
12	JAKARTA	JAYAPURA	PP	14.568.000,00
13	JAKARTA	JOGYAKARTA	PP	4.107.000,00
14	JAKARTA	KENDARI	PP	7.658.000,00
15	JAKARTA	KUPANG	PP	9.413.000,00
16	JAKARTA	MAKASAR	PP	7.444.000,00
17	JAKARTA	MALANG	PP	4.599.000,00
18	JAKARTA	MAMUJU	PP	7.295.000,00
19	JAKARTA	MANADO	PP	10.824.000,00
20	JAKARTA	MANOKWARI	PP	16.226.000,00
21	JAKARTA	MATARAM	PP	5.316.000,00
22	JAKARTA	MEDAN	PP	7.252.000,00
23	JAKARTA	PADANG	PP	5.530.000,00
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	PP	4.984.000,00
25	JAKARTA	PALEMBANG	PP	3.861.000,00
26	JAKARTA	PALU	PP	9.348.000,00
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	PP	3.412.000,00
28	JAKARTA	PEKANBARU	PP	5.583.000,00
29	JAKARTA	PONTIANAK	PP	4.353.000,00
30	JAKARTA	SEMARANG	PP	3.861.000,00
31	JAKARTA	SOLO	PP	3.861.000,00
32	JAKARTA	SURABAYA	PP	5.466.000,00
33	JAKARTA	TERNATE	PP	10.001.000,00
34	JAKARTA	TIMIKA	PP	13.830.000,00
35	AMBON	DENPASAR	PP	8.054.000,00
36	AMBON	JAYAPURA	PP	7.434.000,00
37	AMBON	KENDARI	PP	4.824.000,00
38	AMBON	MAKASAR	PP	6.022.000,00
39	AMBON	MANOKWARI	PP	5.177.000,00
40	AMBON	PALU	PP	6.140.000,00
41	AMBON	SORONG	PP	3.637.000,00
42	AMBON	SURABAYA	PP	8.803.000,00
43	AMBON	TERNATE	PP	4.022.000,00
44	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	PP	12.739.000,00
45	BALIKPAPAN	BATAM	PP	10.354.000,00
46	BALIKPAPAN	DENPASAR	PP	10.739.000,00
47	BALIKPAPAN	JAYAPURA	PP	19.071.000,00
48	BALIKPAPAN	JOGYAKARTA	PP	9.689.000,00
49	BALIKPAPAN	MAKASAR	PP	12.664.000,00
50	BALIKPAPAN	MANADO	PP	15.702.000,00
51	BALIKPAPAN	MEDAN	PP	12.493.000,00
52	BALIKPAPAN	PADANG	PP	10.942.000,00
53	BALIKPAPAN	PALEMBANG	PP	9.445.000,00
54	BALIKPAPAN	PEKANBARU	PP	10.996.000,00
55	BALIKPAPAN	SEMARANG	PP	9.445.000,00
56	BALIKPAPAN	SOLO	PP	9.445.000,00

NO.	URAIAN	KLASIFIKASI	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4	5
57	BALIKPAPAN	SURABAYA	PP	10.889.000,00
58	BALIKPAPAN	TIMIKA	PP	18.408.000,00
59	BANDA ACEH	DENPASAR	PP	10.835.000,00
60	BANDA ACEH	JAYAPURA	PP	19.167.000,00
61	BANDA ACEH	JOGYAKARTA	PP	9.765.000,00
62	BANDA ACEH	MAKASAR	PP	12.760.000,00
63	BANDA ACEH	MANADO	PP	15.798.000,00
64	BANDA ACEH	PONTIANAK	PP	9.990.000,00
65	BANDA ACEH	SEMARANG	PP	9.530.000,00
66	BANDA ACEH	SOLO	PP	9.530.000,00
67	BANDA ACEH	SURABAYA	PP	10.985.000,00
68	BANDA ACEH	TIMIKA	PP	18.504.000,00
69	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	PP	8.129.000,00
70	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	PP	8.225.000,00
71	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	PP	6.193.000,00
72	BANDAR LAMPUNG	BATAM	PP	5.840.000,00
73	BANDAR LAMPUNG	BIAK	PP	14.119.000,00
74	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	PP	6.236.000,00
75	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	PP	14.568.000,00
76	BANDAR LAMPUNG	JOGYAKARTA	PP	5.155.000,00
77	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	PP	8.354.000,00
78	BANDAR LAMPUNG	MAKASAR	PP	8.161.000,00
79	BANDAR LAMPUNG	MALANG	PP	5.594.000,00
80	BANDAR LAMPUNG	MANADO	PP	11.199.000,00
81	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	PP	6.246.000,00
82	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	PP	7.979.000,00
83	BANDAR LAMPUNG	PADANG	PP	6.439.000,00
84	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	PP	5.947.000,00
85	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	PP	4.931.000,00
86	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	PP	6.482.000,00
87	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	PP	5.380.000,00
88	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	PP	4.931.000,00
89	BANDAR LAMPUNG	SOLO	PP	4.931.000,00
90	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	PP	6.386.000,00
91	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	PP	13.905.000,00
92	BANDUNG	BATAM	PP	6.289.000,00
93	BANDUNG	DENPASAR	PP	5.626.000,00
94	BANDUNG	JAKARTA	PP	2.064.000,00
95	BANDUNG	JAMBI	PP	5.006.000,00
96	BANDUNG	JOGYAKARTA	PP	3.369.000,00
97	BANDUNG	PADANG	PP	6.129.000,00
98	BANDUNG	PALEMBANG	PP	4.385.000,00
99	BANDUNG	PANGKAL PINANG	PP	4.599.000,00
100	BANDUNG	PEKANBARU	PP	6.525.000,00
101	BANDUNG	SEMARANG	PP	3.027.000,00
102	BANDUNG	SOLO	PP	3.647.000,00
103	BANDUNG	SURABAYA	PP	4.824.000,00
104	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	PP	4.439.000,00
105	BANJARMASIN	BANDA ACEH	PP	10.792.000,00
106	BANJARMASIN	BATAM	PP	8.407.000,00
107	BANJARMASIN	BIAK	PP	16.686.000,00
108	BANJARMASIN	DENPASAR	PP	8.792.000,00
109	BANJARMASIN	JAYAPURA	PP	17.135.000,00
110	BANJARMASIN	JOGYAKARTA	PP	7.723.000,00
111	BANJARMASIN	MEDAN	PP	10.546.000,00
112	BANJARMASIN	PADANG	PP	9.006.000,00
113	BANJARMASIN	PALEMBANG	PP	7.498.000,00
114	BANJARMASIN	PEKANBARU	PP	9.049.000,00
115	BANJARMASIN	SEMARANG	PP	7.498.000,00
116	BANJARMASIN	SOLO	PP	7.498.000,00
117	BANJARMASIN	SURABAYA	PP	8.942.000,00
118	BANJARMASIN	TIMIKA	PP	16.472.000,00
119	BATAM	BANDA ACEH	PP	10.439.000,00
120	BATAM	DENPASAR	PP	8.450.000,00
121	BATAM	JAYAPURA	PP	16.782.000,00
122	BATAM	JOGYAKARTA	PP	7.370.000,00
123	BATAM	MAKASAR	PP	10.375.000,00
124	BATAM	MANADO	PP	13.413.000,00
125	BATAM	MEDAN	PP	10.193.000,00
126	BATAM	PADANG	PP	8.653.000,00
127	BATAM	PALEMBANG	PP	7.145.000,00
128	BATAM	PEKANBARU	PP	8.707.000,00
129	BATAM	PONTIANAK	PP	7.594.000,00
130	BATAM	SEMARANG	PP	7.145.000,00
131	BATAM	SOLO	PP	7.145.000,00
132	BATAM	SURABAYA	PP	8.600.000,00
133	BATAM	TIMIKA	PP	16.119.000,00
134	BENGGKULU	PALEMBANG	PP	2.899.000,00
135	BIAK	BALIKPAPAN	PP	18.622.000,00
136	BIAK	BANDA ACEH	PP	18.718.000,00
137	BIAK	BATAM	PP	16.333.000,00
138	BIAK	DENPASAR	PP	16.729.000,00

NO.	URAIAN	KLASIFIKASI	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4	5
139	BIAK	JAYAPURA	PP	3.615.000,00
140	BIAK	JOGJAKARTA	PP	15.648.000,00
141	BIAK	MANADO	PP	11.734.000,00
142	BIAK	MEDAN	PP	18.472.000,00
143	BIAK	PADANG	PP	16.932.000,00
144	BIAK	PALEMBANG	PP	15.424.000,00
145	BIAK	PEKANBARU	PP	16.985.000,00
146	BIAK	PONTIANAK	PP	15.873.000,00
147	BIAK	SURABAYA	PP	12.782.000,00
148	BIAK	TIMIKA	PP	5.808.000,00
149	DENPASAR	JAYAPURA	PP	11.680.000,00
150	DENPASAR	KUPANG	PP	5.091.000,00
151	DENPASAR	MAKASSAR	PP	4.182.000,00
152	DENPASAR	MANADO	PP	7.851.000,00
153	DENPASAR	MATARAM	PP	1.840.000,00
154	DENPASAR	MEDAN	PP	10.589.000,00
155	DENPASAR	PADANG	PP	9.049.000,00
156	DENPASAR	PALANGKARAYA	PP	8.557.000,00
157	DENPASAR	PALEMBANG	PP	7.541.000,00
158	DENPASAR	PEKANBARU	PP	9.092.000,00
159	DENPASAR	PONTIANAK	PP	7.990.000,00
160	DENPASAR	TIMIKA	PP	10.140.000,00
161	JAMBI	BALIKPAPAN	PP	7.733.000,00
162	JAMBI	BANJARMASIN	PP	7.690.000,00
163	JAMBI	DENPASAR	PP	7.733.000,00
164	JAMBI	JOGJAKARTA	PP	6.653.000,00
165	JAMBI	KUPANG	PP	11.434.000,00
166	JAMBI	MAKASSAR	PP	9.659.000,00
167	JAMBI	MALANG	PP	7.091.000,00
168	JAMBI	MANADO	PP	12.707.000,00
169	JAMBI	PALANGKARAYA	PP	7.444.000,00
170	JAMBI	PONTIANAK	PP	6.878.000,00
171	JAMBI	SEMARANG	PP	6.428.000,00
172	JAMBI	SOLO	PP	6.428.000,00
173	JAMBI	SURABAYA	PP	7.883.000,00
174	JAYAPURA	JOGJAKARTA	PP	13.274.000,00
<b>18.3</b>	<b>BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (PP)</b>			
	<b>EKONOMI</b>			
1	JAKARTA	AMBON	PP	7.081.000,00
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	PP	3.797.000,00
3	JAKARTA	BANDA ACEH	PP	4.492.000,00
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	PP	1.583.000,00
5	JAKARTA	BANJARMASIN	PP	2.995.000,00
6	JAKARTA	BATAM	PP	2.888.000,00
7	JAKARTA	BENGKULU	PP	7.519.000,00
8	JAKARTA	BIAK	PP	3.262.000,00
9	JAKARTA	DENPASAR	PP	3.262.000,00
10	JAKARTA	GORONTALO	PP	4.824.000,00
11	JAKARTA	JAMBI	PP	2.460.000,00
12	JAKARTA	JAYAPURA	PP	8.193.000,00
13	JAKARTA	JOGYAKARTA	PP	2.268.000,00
14	JAKARTA	KENDARI	PP	4.182.000,00
15	JAKARTA	KUPANG	PP	5.081.000,00
16	JAKARTA	MAKASAR	PP	3.829.000,00
17	JAKARTA	MALANG	PP	2.695.000,00
18	JAKARTA	MAMUJU	PP	4.867.000,00
19	JAKARTA	MANADO	PP	5.102.000,00
20	JAKARTA	MANOKWARI	PP	10.824.000,00
21	JAKARTA	MATARAM	PP	3.230.000,00
22	JAKARTA	MEDAN	PP	3.808.000,00
23	JAKARTA	PADANG	PP	2.952.000,00
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	PP	2.984.000,00
25	JAKARTA	PALEMBANG	PP	2.268.000,00
26	JAKARTA	PALU	PP	5.113.000,00
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	PP	2.139.000,00
28	JAKARTA	PEKANBARU	PP	3.016.000,00
29	JAKARTA	PONTIANAK	PP	2.781.000,00
30	JAKARTA	SEMARANG	PP	2.182.000,00
31	JAKARTA	SOLO	PP	2.342.000,00
32	JAKARTA	SURABAYA	PP	2.674.000,00
33	JAKARTA	TERNATE	PP	6.664.000,00
34	JAKARTA	TIMIKA	PP	7.487.000,00
35	AMBON	DENPASAR	PP	4.471.000,00
36	AMBON	JAYAPURA	PP	4.161.000,00
37	AMBON	KENDARI	PP	2.856.000,00
38	AMBON	MAKASAR	PP	3.455.000,00
39	AMBON	MANOKWARI	PP	3.027.000,00
40	AMBON	PALU	PP	3.508.000,00
41	AMBON	SORONG	PP	2.257.000,00
42	AMBON	SURABAYA	PP	4.845.000,00

NO.	URAIAN	KLASIFIKASI	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4	5
43	AMBON	TERNATE	PP	2.449.000,00
44	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	PP	6.749.000,00
45	BALIKPAPAN	BATAM	PP	5.305.000,00
46	BALIKPAPAN	DENPASAR	PP	5.648.000,00
47	BALIKPAPAN	JAYAPURA	PP	10.086.000,00
48	BALIKPAPAN	JOGYAKARTA	PP	4.749.000,00
49	BALIKPAPAN	MAKASAR	PP	6.150.000,00
50	BALIKPAPAN	MANADO	PP	7.295.000,00
51	BALIKPAPAN	MEDAN	PP	6.140.000,00
52	BALIKPAPAN	PADANG	PP	5.369.000,00
53	BALIKPAPAN	PALEMBANG	PP	4.749.000,00
54	BALIKPAPAN	PEKANBARU	PP	5.423.000,00
55	BALIKPAPAN	SEMARANG	PP	4.674.000,00
56	BALIKPAPAN	SOLO	PP	4.813.000,00
57	BALIKPAPAN	SURABAYA	PP	5.113.000,00
58	BALIKPAPAN	TIMIKA	PP	9.445.000,00
59	BANDA ACEH	DENPASAR	PP	6.279.000,00
60	BANDA ACEH	JAYAPURA	PP	10.717.000,00
61	BANDA ACEH	JOGYAKARTA	PP	5.380.000,00
62	BANDA ACEH	MAKASAR	PP	6.781.000,00
63	BANDA ACEH	MANADO	PP	7.926.000,00
64	BANDA ACEH	PONTIANAK	PP	5.840.000,00
65	BANDA ACEH	SEMARANG	PP	5.305.000,00
66	BANDA ACEH	SOLO	PP	5.444.000,00
67	BANDA ACEH	SURABAYA	PP	5.744.000,00
68	BANDA ACEH	TIMIKA	PP	10.076.000,00
69	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	PP	4.129.000,00
70	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	PP	4.760.000,00
71	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	PP	3.412.000,00
72	BANDAR LAMPUNG	BATAM	PP	3.316.000,00
73	BANDAR LAMPUNG	BIAK	PP	7.487.000,00
74	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	PP	3.647.000,00
75	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	PP	8.097.000,00
76	BANDAR LAMPUNG	JOGYAKARTA	PP	2.760.000,00
77	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	PP	4.482.000,00
78	BANDAR LAMPUNG	MAKASAR	PP	4.161.000,00
79	BANDAR LAMPUNG	MALANG	PP	3.134.000,00
80	BANDAR LAMPUNG	MANADO	PP	5.305.000,00
81	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	PP	3.626.000,00
82	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	PP	4.150.000,00
83	BANDAR LAMPUNG	PADANG	PP	3.380.000,00
84	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	PP	3.401.000,00
85	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	PP	2.760.000,00
86	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	PP	3.433.000,00
87	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	PP	3.220.000,00
88	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	PP	2.685.000,00
89	BANDAR LAMPUNG	SOLO	PP	2.824.000,00
90	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	PP	3.123.000,00
91	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	PP	7.455.000,00
92	BANDUNG	BATAM	PP	3.583.000,00
93	BANDUNG	DENPASAR	PP	3.252.000,00
94	BANDUNG	JAKARTA	PP	1.476.000,00
95	BANDUNG	JAMBI	PP	2.941.000,00
96	BANDUNG	JOGYAKARTA	PP	2.129.000,00
97	BANDUNG	PADANG	PP	3.508.000,00
98	BANDUNG	PALEMBANG	PP	2.631.000,00
99	BANDUNG	PANGKAL PINANG	PP	2.738.000,00
100	BANDUNG	PEKANBARU	PP	3.701.000,00
101	BANDUNG	SEMARANG	PP	1.957.000,00
102	BANDUNG	SOLO	PP	2.268.000,00
103	BANDUNG	SURABAYA	PP	2.856.000,00
104	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	PP	2.663.000,00
105	BANJARMASIN	BANDA ACEH	PP	6.022.000,00
106	BANJARMASIN	BATAM	PP	4.578.000,00
107	BANJARMASIN	BIAK	PP	8.749.000,00
108	BANJARMASIN	DENPASAR	PP	4.920.000,00
109	BANJARMASIN	JAYAPURA	PP	9.359.000,00
110	BANJARMASIN	JOGYAKARTA	PP	4.022.000,00
111	BANJARMASIN	MEDAN	PP	5.412.000,00
112	BANJARMASIN	PADANG	PP	4.642.000,00
113	BANJARMASIN	PALEMBANG	PP	4.022.000,00
114	BANJARMASIN	PEKANBARU	PP	4.696.000,00
115	BANJARMASIN	SEMARANG	PP	3.958.000,00
116	BANJARMASIN	SOLO	PP	4.097.000,00
117	BANJARMASIN	SURABAYA	PP	4.385.000,00
118	BANJARMASIN	TIMIKA	PP	8.717.000,00
119	BATAM	BANDA ACEH	PP	5.936.000,00
120	BATAM	DENPASAR	PP	4.824.000,00
121	BATAM	JAYAPURA	PP	9.263.000,00
122	BATAM	JOGYAKARTA	PP	3.936.000,00
123	BATAM	MAKASAR	PP	5.337.000,00
124	BATAM	MANADO	PP	6.482.000,00



NO.	URAIAN	KLASIFIKASI	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4	5
125	BATAM	MEDAN	PP	5.316.000,00
126	BATAM	PADANG	PP	4.546.000,00
127	BATAM	PALEMBANG	PP	3.936.000,00
128	BATAM	PEKANBARU	PP	4.599.000,00
129	BATAM	PONTIANAK	PP	4.396.000,00
130	BATAM	SEMARANG	PP	3.861.000,00
131	BATAM	SOLO	PP	4.000.000,00
132	BATAM	SURABAYA	PP	4.300.000,00
133	BATAM	TIMIKA	PP	8.621.000,00
134	BENGKULU	PALEMBANG	PP	1.893.000,00
135	BIAK	BALIKPAPAN	PP	9.477.000,00
136	BIAK	BANDA ACEH	PP	10.108.000,00
137	BIAK	BATAM	PP	8.664.000,00
138	BIAK	DENPASAR	PP	8.995.000,00
139	BIAK	JAYAPURA	PP	2.321.000,00
140	BIAK	JOGJAKARTA	PP	8.108.000,00
141	BIAK	MANADO	PP	6.353.000,00
142	BIAK	MEDAN	PP	9.498.000,00
143	BIAK	PADANG	PP	8.728.000,00
144	BIAK	PALEMBANG	PP	8.108.000,00
145	BIAK	PEKANBARU	PP	8.381.000,00
146	BIAK	PONTIANAK	PP	8.568.000,00
147	BIAK	SURABAYA	PP	7.081.000,00
148	BIAK	TIMIKA	PP	3.444.000,00
149	DENPASAR	JAYAPURA	PP	6.845.000,00
150	DENPASAR	KUPANG	PP	2.952.000,00
151	DENPASAR	MAKASSAR	PP	2.631.000,00
152	DENPASAR	MANADO	PP	4.278.000,00
153	DENPASAR	MATARAM	PP	1.390.000,00
154	DENPASAR	MEDAN	PP	5.658.000,00
155	DENPASAR	PADANG	PP	4.888.000,00
156	DENPASAR	PALANGKARAYA	PP	4.909.000,00
157	DENPASAR	PALEMBANG	PP	4.278.000,00
158	DENPASAR	PEKANBARU	PP	4.942.000,00
159	DENPASAR	PONTIANAK	PP	4.738.000,00
160	DENPASAR	TIMIKA	PP	6.129.000,00
161	JAMBI	BALIKPAPAN	PP	4.407.000,00
162	JAMBI	BANJARMASIN	PP	4.193.000,00
163	JAMBI	DENPASAR	PP	4.439.000,00
164	JAMBI	JOGJAKARTA	PP	3.551.000,00
165	JAMBI	KUPANG	PP	6.075.000,00
166	JAMBI	MAKASSAR	PP	4.952.000,00
167	JAMBI	MALANG	PP	3.925.000,00
168	JAMBI	MANADO	PP	6.097.000,00
169	JAMBI	PALANGKARAYA	PP	4.193.000,00
170	JAMBI	PONTIANAK	PP	4.011.000,00
171	JAMBI	SEMARANG	PP	3.476.000,00
172	JAMBI	SOLO	PP	3.615.000,00
173	JAMBI	SURABAYA	PP	3.915.000,00
174	JAYAPURA	JOGJAKARTA	PP	7.690.000,00
<b>18.4</b>	<b>BIAYA TRANSPORTASI LAUT DALAM NEGERI</b>			
	<b>Eksekutif</b>			
1	Biaya Transportasi Laut Dalam Negeri	Walikota	Orang	Kelas IB
2	Biaya Transportasi Laut Dalam Negeri	Wakil Walikota	Orang	Kelas IB
3	Biaya Transportasi Laut Dalam Negeri	Sekretaris Daerah/Ketua DPRD	Orang	Kelas IB
4	Biaya Transportasi Laut Dalam Negeri	Eselon II b	Orang	Kelas IIA
5	Biaya Transportasi Laut Dalam Negeri	Wakil Ketua / Anggota DPRD	Orang	Kelas IIA
6	Biaya Transportasi Laut Dalam Negeri	Eselon III, IV, V dan Golongan IV	Orang	Kelas IIA
7	Biaya Transportasi Laut Dalam Negeri	Staf Golongan III, II, I dan Pegawai Tidak Tetap	Orang	Kelas IIA
<b>18.5</b>	<b>BIAYA BESARAN UANG HARIAN DALAM NEGERI</b>			
<b>a</b>	<b>Biaya Besaran Uang Harian Walikota</b>			
	<b>Provinsi Jawa Timur</b>			
1	Ngawi, Magetan, Ponorogo, Kab. Madiun, Nganjuk	Walikota	OH	550.000,00
2	Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Kediri, Bojonegoro, Tuban, Blitar, Jombang, Mojokerto, Lamongan, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Malang, Batu	Walikota	OH	1.250.000,00
3	Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, Probolinggo, Banyuwangi, Sampang, Bangkalan, Pamekasan, Sumenep	Walikota	OH	1.500.000,00
	<b>Provinsi Jawa Tengah</b>			
4	Sragen, Wonogiri, Solo, Karanganyar	Walikota	OH	750.000,00
5	Temanggung, Wonosobo, Magelang, Purworejo, Rembang, Kebumen, Pemalang, Semarang, Blora, Pati, Kendal	Walikota	OH	1.250.000,00

NO.	URAIAN	KLASIFIKASI	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4	5
6	Kudus, Demak, Jepara, Grobogan, Pekalongan, Tegal, Brebes, Cilacap, Batang, Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga, Boyolali, Klaten	Walikota	OH	1.500.000,00
<b>Provinsi DI Yogyakarta</b>				
7	Yogyakarta, Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul, Bantul	Walikota	OH	1.500.000,00
<b>Provinsi Jawa Barat</b>				
8	Indramayu, Cirebon, Karawang, Kuningan, Majalengka, Purwakarta, Subang, Ciamis, Tasikmalaya, Cimahi, Bandung, Sumedang, Sukabumi, Garut, Cianjur, Bekasi, Bogor, Depok	Walikota	OH	1.500.000,00
<b>Provinsi Banten</b>				
9	Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang, Cilegon	Walikota	OH	1.500.000,00
<b>Propinsi DKI Jakarta</b>				
10	Jakarta	Walikota	OH	1.700.000,00
<b>Provinsi Luar Pulau Jawa</b>				
11	Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatra Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Irian Barat	Walikota	OH	2.500.000,00
<b>b Blaya Besar an Uang Harian Wakil Walikota Provinsi Jawa Timur</b>				
1	Ngawi, Magetan, Ponorogo, Kota Madiun, Nganjuk	Wakil Walikota	OH	484.000,00
2	Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Kediri, Bojonegoro, Tuban, Blitar, Jombang, Mojokerto, Lamongan, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Malang, Batu	Wakil Walikota	OH	1.100.000,00
3	Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, Probolinggo, Banyuwangi, Sampang, Bangkalan, Pamekasan, Sumenep	Wakil Walikota	OH	1.320.000,00
<b>Provinsi Jawa Tengah</b>				
4	Sragen, Wonogiri, Solo, Karanganyar	Wakil Walikota	OH	660.000,00
5	Temanggung, Wonosobo, Magelang, Purworejo, Rembang, Kebumen, Pemalang, Semarang, Blora, Pati, Kendal	Wakil Walikota	OH	1.100.000,00
6	Kudus, Demak, Jepara, Grobogan, Pekalongan, Tegal, Brebes, Cilacap, Batang, Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga, Boyolali, Klaten	Wakil Walikota	OH	1.320.000,00
<b>Provinsi DI Yogyakarta</b>				
7	Yogyakarta, Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul, Bantul	Wakil Walikota	OH	1.320.000,00
<b>Provinsi Jawa Barat</b>				
8	Indramayu, Cirebon, Karawang, Kuningan, Majalengka, Purwakarta, Subang, Ciamis, Tasikmalaya, Cimahi, Bandung, Sumedang, Sukabumi, Garut, Cianjur, Bekasi, Bogor, Depok	Wakil Walikota	OH	1.320.000,00
<b>Provinsi Banten</b>				
9	Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang, Cilegon	Wakil Walikota	OH	1.320.000,00
<b>Propinsi DKI Jakarta</b>				
10	Jakarta	Wakil Walikota	OH	1.500.000,00
<b>Provinsi Luar Pulau Jawa</b>				
11	Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatra Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Irian Barat	Wakil Walikota	OH	2.000.000,00

NO.	URAIAN	KLASIFIKASI	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4	5
<b>c</b>	<b>Blaya Besar an Uang Harian Pejabat Struktural (Eselon) II a</b>			
	<b>Provinsi Jawa Timur</b>			
1	Ngawi, Magetan, Ponorogo, Kab. Madiun, Nganjuk	Pejabat Struktural (Eselon) II a	OH	440.000,00
2	Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Kediri, Bojonegoro, Tuban, Blitar, Jombang, Mojokerto, Lamongan, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Malang, Batu	Pejabat Struktural (Eselon) II a	OH	1.000.000,00
3	Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, Probolinggo, Banyuwangi, Sampang, Bangkalan, Pamekasan, Sumenep	Pejabat Struktural (Eselon) II a	OH	1.200.000,00
	<b>Provinsi Jawa Tengah</b>			
4	Sragen, Wonogiri, Solo, Karanganyar	Pejabat Struktural (Eselon) II a	OH	600.000,00
5	Temanggung, Wonosobo, Magelang, Purworejo, Rembang, Kebumen, Pemalang, Semarang, Blora, Pati, Kendal	Pejabat Struktural (Eselon) II a	OH	1.000.000,00
6	Kudus, Demak, Jepara, Grobogan, Pekalongan, Tegal, Brebes, Cilacap, Batang, Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga, Boyolali, Klaten	Pejabat Struktural (Eselon) II a	OH	1.200.000,00
	<b>Provinsi DI Yogyakarta</b>			
7	Yogyakarta, Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul, Bantul	Pejabat Struktural (Eselon) II a	OH	1.200.000,00
	<b>Provinsi Jawa Barat</b>			
8	Indramayu, Cirebon, Karawang, Kuningan, Majalengka, Purwakarta, Subang, Ciamis, Tasikmalaya, Cimahi, Bandung, Sumedang, Sukabumi, Garut, Cianjur, Bekasi, Boqor, Depok	Pejabat Struktural (Eselon) II a	OH	1.200.000,00
	<b>Provinsi Banten</b>			
9	Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang, Cilegon	Pejabat Struktural (Eselon) II a	OH	1.200.000,00
	<b>Propinsi DKI Jakarta</b>			
10	Jakarta	Pejabat Struktural (Eselon) II a	OH	1.400.000,00
	<b>Provinsi Luar Pulau Jawa</b>			
11	Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatra Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Irian Barat	Pejabat Struktural (Eselon) II a	OH	1.800.000,00
<b>d</b>	<b>Blaya Besar an Uang Harian Pejabat Struktural (Eselon) II b</b>			
	<b>Provinsi Jawa Timur</b>			
1	Ngawi, Magetan, Ponorogo, Kab. Madiun, Nganjuk	Pejabat Struktural (Eselon) II b	OH	396.000,00
2	Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Kediri, Bojonegoro, Tuban, Blitar, Jombang, Mojokerto, Lamongan, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Malang, Batu	Pejabat Struktural (Eselon) II b	OH	900.000,00
3	Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, Probolinggo, Banyuwangi, Sampang, Bangkalan, Pamekasan, Sumenep	Pejabat Struktural (Eselon) II b	OH	1.080.000,00
	<b>Provinsi Jawa Tengah</b>			
4	Sragen, Wonogiri, Solo, Karanganyar	Pejabat Struktural (Eselon) II b	OH	540.000,00
5	Temanggung, Wonosobo, Magelang, Purworejo, Rembang, Kebumen, Pemalang, Semarang, Blora, Pati, Kendal	Pejabat Struktural (Eselon) II b	OH	900.000,00
6	Kudus, Demak, Jepara, Grobogan, Pekalongan, Tegal, Brebes, Cilacap, Batang, Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga, Boyolali, Klaten	Pejabat Struktural (Eselon) II b	OH	1.080.000,00
	<b>Provinsi DI Yogyakarta</b>			
7	Yogyakarta, Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul, Bantul	Pejabat Struktural (Eselon) II b	OH	1.080.000,00
	<b>Provinsi Jawa Barat</b>			
8	Indramayu, Cirebon, Karawang, Kuningan, Majalengka, Purwakarta, Subang, Ciamis, Tasikmalaya, Cimahi, Bandung, Sumedang, Sukabumi, Garut, Cianjur, Bekasi, Boqor, Depok	Pejabat Struktural (Eselon) II b	OH	1.080.000,00

NO.	URAIAN	KLASIFIKASI	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4	5
	<b>Provinsi Banten</b>			
9	Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang, Cilegon	Pejabat Struktural (Eselon) II b	OH	1.080.000,00
	<b>Propinsi DKI Jakarta</b>			
10	Jakarta	Pejabat Struktural (Eselon) II b	OH	1.300.000,00
	<b>Provinsi Luar Pulau Jawa</b>			
11	Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatra Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Irian Barat	Pejabat Struktural (Eselon) II b	OH	1.700.000,00
<b>e</b>	<b>Biaya Besaran Uang Harian Ketua/Wakil Ketua/Anggota DPRD</b>			
	<b>Provinsi Jawa Timur</b>			
1	Ngawi, Magetan, Ponorogo, Kab. Madiun, Nganjuk	Ketua/Wakil Ketua/Anggota DPRD	OH	396.000,00
2	Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Kediri, Bojonegoro, Tuban, Blitar, Jombang, Mojokerto, Lamongan, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Malang, Batu	Ketua/Wakil Ketua/Anggota DPRD	OH	900.000,00
3	Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, Probolinggo, Banyuwangi, Sampang, Bangkalan, Pamekasan, Sumenep	Ketua/Wakil Ketua/Anggota DPRD	OH	1.080.000,00
	<b>Provinsi Jawa Tengah</b>			
4	Sragen, Wonogiri, Solo, Karanganyar	Ketua/Wakil Ketua/Anggota DPRD	OH	540.000,00
5	Temanggung, Wonosobo, Magelang, Purworejo, Rembang, Kebumen, Pemalang, Semarang, Blora, Pati, Kendal	Ketua/Wakil Ketua/Anggota DPRD	OH	900.000,00
6	Kudus, Demak, Jepara, Grobogan, Pekalongan, Tegal, Brebes, Cilacap, Batang, Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga, Boyolali, Klaten	Ketua/Wakil Ketua/Anggota DPRD	OH	1.080.000,00
	<b>Provinsi DI Yogyakarta</b>			
7	Yogyakarta, Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul, Bantul	Ketua/Wakil Ketua/Anggota DPRD	OH	1.080.000,00
	<b>Provinsi Jawa Barat</b>			
8	Indramayu, Cirebon, Karawang, Kuningan, Majalengka, Purwakarta, Subang, Ciamis, Tasikmalaya, Cimahi, Bandung, Sumedang, Sukabumi, Garut, Cianjur, Bekasi, Bogor, Depok	Ketua/Wakil Ketua/Anggota DPRD	OH	1.080.000,00
	<b>Provinsi Banten</b>			
10	Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang, Cilegon	Ketua/Wakil Ketua/Anggota DPRD	OH	1.080.000,00
	<b>Propinsi DKI Jakarta</b>			
11	Jakarta	Ketua/Wakil Ketua/Anggota DPRD	OH	1.300.000,00
	<b>Provinsi Luar Pulau Jawa</b>			
12	Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatra Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Irian Barat	Ketua/Wakil Ketua/Anggota DPRD	OH	1.700.000,00
<b>f</b>	<b>Biaya Besaran Uang Harian Pejabat Struktural (Eselon) III</b>			
	<b>Provinsi Jawa Timur</b>			
1	Ngawi, Magetan, Ponorogo, Kab. Madiun, Nganjuk	Pejabat Struktural (Eselon) III	OH	352.000,00
2	Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Kediri, Bojonegoro, Tuban, Blitar, Jombang, Mojokerto, Lamongan, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Malang, Batu	Pejabat Struktural (Eselon) III	OH	800.000,00
3	Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, Probolinggo, Banyuwangi, Sampang, Bangkalan, Pamekasan, Sumenep	Pejabat Struktural (Eselon) III	OH	960.000,00

NO.	URAIAN	KLASIFIKASI	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4	5
	<b>Provinsi Jawa Tengah</b>			
4	Sragen, Wonogiri, Solo, Karanganyar	Pejabat Struktural (Eselon) III	OH	480.000,00
5	Temanggung, Wonosobo, Magelang, Purworejo, Rembang, Kebumen, Pemalang, Semarang, Blora, Pati, Kendal	Pejabat Struktural (Eselon) III	OH	800.000,00
6	Kudus, Demak, Jepara, Grobogan, Pekalongan, Tegal, Brebes, Cilacap, Batang, Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga, Bovolali, Klaten	Pejabat Struktural (Eselon) III	OH	960.000,00
	<b>Provinsi DI Yogyakarta</b>			
7	Yogyakarta, Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul, Bantul	Pejabat Struktural (Eselon) III	OH	960.000,00
	<b>Provinsi Jawa Barat</b>			
8	Indramayu, Cirebon, Karawang, Kuningan, Majalengka, Purwakarta, Subang, Ciamis, Tasikmalaya, Cimahi, Bandung, Sumedang, Sukabumi, Garut, Cianjur, Bekasi, Bogor, Depok	Pejabat Struktural (Eselon) III	OH	960.000,00
	<b>Provinsi Banten</b>			
9	Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang, Cilegon	Pejabat Struktural (Eselon) III	OH	960.000,00
	<b>Propinsi DKI Jakarta</b>			
10	Jakarta	Pejabat Struktural (Eselon) III	OH	1.200.000,00
	<b>Provinsi Luar Pulau Jawa</b>			
11	Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatra Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung, ali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Irian Barat	Pejabat Struktural (Eselon) III	OH	1.500.000,00
<b>g</b>	<b>Blaya Besar Uang Harian Pejabat Struktural (Eselon) IV dan V</b>			
	<b>Provinsi Jawa Timur</b>			
1	Ngawi, Magetan, Ponorogo, Kab. Madiun, Nganjuk	Pejabat Struktural (Eselon) IV dan V	OH	308.000,00
2	Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Kediri, Bojonegoro, Tuban, Blitar, Jombang, Mojokerto, Lamongan, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Malang, Batu	Pejabat Struktural (Eselon) IV dan V	OH	700.000,00
3	Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, Probolinggo, Banyuwangi, Sampang, Bangkalan, Pamekasan, Sumenep	Pejabat Struktural (Eselon) IV dan V	OH	840.000,00
	<b>Provinsi Jawa Tengah</b>			
4	Sragen, Wonogiri, Solo, Karanganyar	Pejabat Struktural (Eselon) IV dan V	OH	420.000,00
5	Temanggung, Wonosobo, Magelang, Purworejo, Rembang, Kebumen, Pemalang, Semarang, Blora, Pati, Kendal	Pejabat Struktural (Eselon) IV dan V	OH	700.000,00
6	Kudus, Demak, Jepara, Grobogan, Pekalongan, Tegal, Brebes, Cilacap, Batang, Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga, Bovolali, Klaten	Pejabat Struktural (Eselon) IV dan V	OH	840.000,00
	<b>Provinsi DI Yogyakarta</b>			
7	Yogyakarta, Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul, Bantul	Pejabat Struktural (Eselon) IV dan V	OH	840.000,00
	<b>Provinsi Jawa Barat</b>			
8	Indramayu, Cirebon, Karawang, Kuningan, Majalengka, Purwakarta, Subang, Ciamis, Tasikmalaya, Cimahi, Bandung, Sumedang, Sukabumi, Garut, Cianjur, Bekasi, Bogor, Depok	Pejabat Struktural (Eselon) IV dan V	OH	840.000,00
	<b>Provinsi Banten</b>			
9	Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang, Cilegon	Pejabat Struktural (Eselon) IV dan V	OH	840.000,00
	<b>Propinsi DKI Jakarta</b>			
10	Jakarta	Pejabat Struktural (Eselon) IV dan V	OH	1.100.000,00

NO.	URAIAN	KLASIFIKASI	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4	5
	<b>Provinsi Luar Pulau Jawa</b>			
11	Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatra Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Irian Barat	Pejabat Struktural (Eselon) IV dan V	OH	1.300.000,00
	<b>h Biaya Besaran Uang Harian Staf / Golongan IV dan III</b>			
	<b>Provinsi Jawa Timur</b>			
1	Ngawi, Magetan, Ponorogo, Kab. Madiun, Nganjuk	Staf / Golongan IV dan III	OH	264.000,00
2	Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Kediri, Bojonegoro, Tuban, Blitar, Jombang, Mojokerto, Lamongan, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Malang, Batu	Staf / Golongan IV dan III	OH	600.000,00
3	Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, Probolinggo, Banyuwangi, Sampang, Bangkalan, Pamekasan, Sumenep	Staf / Golongan IV dan III	OH	720.000,00
	<b>Provinsi Jawa Tengah</b>			
5	Sragen, Wonogiri, Solo, Karanganyar	Staf / Golongan IV dan III	OH	360.000,00
6	Temanggung, Wonosobo, Magelang, Purworejo, Rembang, Kebumen, Pemalang, Semarang, Blora, Pati, Kendal	Staf / Golongan IV dan III	OH	600.000,00
7	Kudus, Demak, Jepara, Grobogan, Pekalongan, Tegal, Brebes, Cilacap, Batang, Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga, Boyolali, Klaten	Staf / Golongan IV dan III	OH	720.000,00
	<b>Provinsi DI Yogyakarta</b>			
8	Yogyakarta, Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul, Bantul	Staf / Golongan IV dan III	OH	720.000,00
	<b>Provinsi Jawa Barat</b>			
9	Indramayu, Cirebon, Karawang, Kuningan, Majalengka, Purwakarta, Subang, Ciamis, Tasikmalaya, Cimahi, Bandung, Sumedang, Sukabumi, Garut, Cianjur, Bekasi, Bogor, Depok	Staf / Golongan IV dan III	OH	720.000,00
	<b>Provinsi Banten</b>			
10	Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang, Cilegon	Staf / Golongan IV dan III	OH	720.000,00
	<b>Propinsi DKI Jakarta</b>			
11	Jakarta	Staf / Golongan IV	OH	1.000.000,00
	<b>Provinsi Luar Pulau Jawa</b>			
12	Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatra Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Irian Barat	Staf / Golongan IV	OH	1.200.000,00
	<b>i Biaya Besaran Uang Harian Staf / Golongan II, I, PTT dan GTT, Soplr</b>			
	<b>Provinsi Jawa Timur</b>			
1	Ngawi, Magetan, Ponorogo, Kab. Madiun, Nganjuk	Staf / Golongan II, I, PTT dan GTT	OH	220.000,00
2	Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Kediri, Bojonegoro, Tuban, Blitar, Jombang, Mojokerto, Lamongan, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Malang, Batu	Staf / Golongan II, I, PTT dan GTT	OH	500.000,00
3	Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, Probolinggo, Banyuwangi, Sampang, Bangkalan, Pamekasan, Sumenep	Staf / Golongan II, I, PTT dan GTT	OH	600.000,00
	<b>Provinsi Jawa Tengah</b>			
4	Sragen, Wonogiri, Solo, Karanganyar	Staf / Golongan II, I, PTT dan GTT	OH	300.000,00
5	Temanggung, Wonosobo, Magelang, Purworejo, Rembang, Kebumen, Pemalang, Semarang, Blora, Pati, Kendal	Staf / Golongan II, I, PTT dan GTT	OH	500.000,00

NO.	URAIAN	KLASIFIKASI	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4	5
6	Kudus, Demak, Jepara, Grobogan, Pekalongan, Tegal, Brebes, Cilacap, Batang, Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga, Boyolali, Klaten	Staf / Golongan II, I, PTT dan GTT	OH	600.000,00
<b>Provinsi DI Yogyakarta</b>				
8	Yogyakarta, Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul, Bantul	Staf / Golongan II, I, PTT dan GTT	OH	600.000,00
<b>Provinsi Jawa Barat</b>				
9	Indramayu, Cirebon, Karawang, Kuningan, Majalengka, Purwakarta, Subang, Ciamis, Tasikmalaya, Cimahi, Bandung, Sumedang, Sukabumi, Garut, Cianjur, Bekasi, Bogor, Depok	Staf / Golongan II, I, PTT dan GTT	OH	600.000,00
<b>Provinsi Banten</b>				
10	Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang, Cilegon	Staf / Golongan II, I, PTT dan GTT	OH	600.000,00
<b>Propinsi DKI Jakarta</b>				
11	Jakarta	Staf / Golongan II, I, PTT dan GTT	OH	800.000,00
<b>Provinsi Luar Pulau Jawa</b>				
12	Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatra Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Irian Barat	Staf / Golongan II, I, PTT dan GTT	OH	800.000,00
<b>J Blaya Besar an Uang Harian Sopir</b>				
<b>Provinsi Jawa Timur</b>				
1	Ngawi, Magetan, Ponorogo, Kab. Madiun, Nganjuk, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Kediri, Bojonegoro, Tuban, Blitar, Jombang, Mojokerto, Lamongan, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Malang, Batu, Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, Probolinggo, Banyuwangi, Sampang, Bangkalan, Pamekasan, Sumenep	Sopir	OH	220.000,00
<b>Provinsi Jawa Tengah</b>				
2	Sragen, Wonogiri, Solo, Karanganyar, Boyolali, Klaten, Temanggung, Wonosobo, Magelang, Purworejo, Rembang, Kebumen, Pemalang, Semarang, Blora, Pati, Kendal, Kudus, Demak, Jepara, Grobogan, Pekalongan, Tegal, Brebes, Cilacap, Batang, Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga	Sopir	OH	300.000,00
<b>Provinsi DI Yogyakarta</b>				
3	Yogyakarta, Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul, Bantul	Sopir	OH	600.000,00
<b>Provinsi Jawa Barat</b>				
4	Indramayu, Cirebon, Karawang, Kuningan, Majalengka, Purwakarta, Subang, Ciamis, Tasikmalaya, Cimahi, Bandung, Sumedang, Sukabumi, Garut, Cianjur, Bekasi, Bogor, Depok	Sopir	OH	600.000,00
<b>Provinsi Banten</b>				
5	Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang, Cilegon	Sopir	OH	600.000,00
<b>Propinsi DKI Jakarta</b>				
6	Jakarta	Sopir	OH	800.000,00
<b>Provinsi Luar Pulau Jawa</b>				
7	Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatra Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Irian Barat	Sopir	OH	800.000,00

NO.	URAIAN	KLASIFIKASI	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4	5
<b>18.6</b>	<b>BIAYA PENGINAPAN DALAM NEGERI</b>			
<b>a</b>	<b>Biaya Penginapan Dalam Negeri Walikota</b>			
	<b>Provinsi Jawa Timur</b>			
1	Ngawi, Magetan, Ponorogo, Kab. Madiun, Nganjuk, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Kediri, Bojonegoro, Tuban, Blitar, Jombang, Mojokerto, Lamongan, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Malang, Batu, Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, Probolinggo, Banyuwangi, Sampang, Bangkalan, Pamekasan, Sumenep	Walikota, Bintang Lima Suite Room	OH	4.400.000,00
	<b>Provinsi Jawa Tengah</b>			
2	Sragen, Wonogiri, Solo, Karanganyar, Boyolali, Klaten, Temanggung, Wonosobo, Magelang, Purworejo, Rembang, Kebumen, Pemalang, Semarang, Blora, Pati, Kendal, Kudus, Demak, Jepara, Grobogan, Pekalongan, Tegal, Brebes, Cilacap, Batang, Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga	Walikota, Bintang Lima Suite Room	OH	4.146.000,00
	<b>Provinsi DI Yogyakarta</b>			
3	Yogyakarta, Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul, Bantul	Walikota, Bintang Lima Suite Room	OH	4.620.000,00
	<b>Provinsi Jawa Barat</b>			
4	Indramayu, Cirebon, Karawang, Kuningan, Majalengka, Purwakarta, Subang, Ciamis, Tasikmalaya, Cimahi, Bandung, Sumedang, Sukabumi, Garut, Cianjur, Bekasi, Bogor, Depok	Walikota, Bintang Lima Suite Room	OH	3.664.000,00
	<b>Provinsi Banten</b>			
5	Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang, Cilegon	Walikota, Bintang Lima Suite Room	OH	3.808.000,00
	<b>Provinsi DKI Jakarta</b>			
6	Jakarta	Walikota, Bintang Lima Suite Room	OH	8.720.000,00
	<b>Provinsi Luar Pulau Jawa</b>			
7	Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatra Barat	Walikota, Bintang Lima Suite Room	OH	4.420.000,00
8	Sumatra Utara	Walikota, Bintang Lima Suite Room	OH	4.960.000,00
9	Riau	Walikota, Bintang Lima Suite Room	OH	3.817.000,00
10	Kepulauan Riau	Walikota, Bintang Lima Suite Room	OH	4.275.000,00
11	Jambi dan Kalimantan Timur	Walikota, Bintang Lima Suite Room	OH	4.000.000,00
12	Sumatra Selatan	Walikota, Bintang Lima Suite Room	OH	4.680.000,00
13	Lampung	Walikota, Bintang Lima Suite Room	OH	3.960.000,00
14	Bengkulu	Walikota, Bintang Lima Suite Room	OH	1.300.000,00
15	Bangka Belitung	Walikota, Bintang Lima Suite Room	OH	3.335.000,00
16	Bali	Walikota, Bintang Lima Suite Room	OH	4.881.000,00
17	Nusa Tenggara Barat	Walikota, Bintang Lima Suite Room	OH	3.429.000,00
18	Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Maluku	Walikota, Bintang Lima Suite Room	OH	3.000.000,00
19	Kalimantan Barat	Walikota, Bintang Lima Suite Room	OH	2.400.000,00
20	Kalimantan Selatan	Walikota, Bintang Lima Suite Room	OH	4.250.000,00
21	Sulawesi Utara	Walikota, Bintang Lima Suite Room	OH	3.200.000,00
22	Gorontalo	Walikota, Bintang Lima Suite Room	OH	1.320.000,00
23	Sulawesi Barat	Walikota, Bintang Lima Suite Room	OH	1.260.000,00
24	Sulawesi Selatan	Walikota, Bintang Lima Suite Room	OH	4.820.000,00
25	Sulawesi Tengah	Walikota, Bintang Lima Suite Room	OH	2.030.000,00
26	Sulawesi Tenggara	Walikota, Bintang Lima Suite Room	OH	1.850.000,00
27	Maluku Utara	Walikota, Bintang Lima Suite Room	OH	3.110.000,00
28	Papua	Walikota, Bintang Lima Suite Room	OH	2.850.000,00
29	Irian Barat	Walikota, Bintang Lima Suite Room	OH	2.750.000,00
	<b>b</b>			
	<b>Biaya Penginapan Dalam Negeri Wakil Walikota</b>			
	<b>Provinsi Jawa Timur</b>			
1	Ngawi, Magetan, Ponorogo, Kab. Madiun, Nganjuk, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Kediri, Bojonegoro, Tuban, Blitar, Jombang, Mojokerto, Lamongan, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Malang, Batu, Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, Probolinggo, Banyuwangi, Sampang, Bangkalan, Pamekasan, Sumenep	Wakil Walikota, Bintang Lima Delux Room	OH	4.400.000,00
	<b>Provinsi Jawa Tengah</b>			
2	Sragen, Wonogiri, Solo, Karanganyar, Boyolali, Klaten, Temanggung, Wonosobo, Magelang, Purworejo, Rembang, Kebumen, Pemalang, Semarang, Blora, Pati, Kendal, Kudus, Demak, Jepara, Grobogan, Pekalongan, Tegal, Brebes, Cilacap, Batang, Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga	Wakil Walikota, Bintang Lima Delux Room	OH	4.146.000,00



NO.	URAIAN	KLASIFIKASI	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4	5
	<b>Provinsi DI Yogyakarta</b>			
3	Yogyakarta, Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul, Bantul	Wakil Walikota, Bintang Lima Delux Room	OH	4.620.000,00
	<b>Provinsi Jawa Barat</b>			
4	Indramayu, Cirebon, Karawang, Kuningan, Majalengka, Purwakarta, Subang, Ciamis, Tasikmalaya, Cimahi, Bandung, Sumedang, Sukabumi, Garut, Cianjur, Bekasi, Bogor, Depok	Wakil Walikota, Bintang Lima Delux Room	OH	3.664.000,00
	<b>Provinsi Banten</b>			
5	Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang, Cilegon	Wakil Walikota, Bintang Lima Delux Room	OH	3.808.000,00
	<b>Propinsi DKI Jakarta</b>			
6	Jakarta	Wakil Walikota, Bintang Lima Delux Room	OH	8.720.000,00
	<b>Provinsi Luar Pulau Jawa</b>			
7	Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatra Barat	Wakil Walikota, Bintang Lima Delux Room	OH	4.420.000,00
8	Sumatra Utara	Wakil Walikota, Bintang Lima Delux Room	OH	4.960.000,00
9	Riau	Wakil Walikota, Bintang Lima Delux Room	OH	3.817.000,00
10	Kepulauan Riau	Wakil Walikota, Bintang Lima Delux Room	OH	4.275.000,00
11	Jambi dan Kalimantan Timur	Wakil Walikota, Bintang Lima Delux Room	OH	4.000.000,00
12	Sumatra Selatan	Wakil Walikota, Bintang Lima Delux Room	OH	4.680.000,00
13	Lampung	Wakil Walikota, Bintang Lima Delux Room	OH	3.960.000,00
14	Bengkulu	Wakil Walikota, Bintang Lima Delux Room	OH	1.300.000,00
15	Bangka Belitung	Wakil Walikota, Bintang Lima Delux Room	OH	3.335.000,00
16	Bali	Wakil Walikota, Bintang Lima Delux Room	OH	4.881.000,00
17	Nusa Tenggara Barat	Wakil Walikota, Bintang Lima Delux Room	OH	3.429.000,00
18	Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Maluku	Wakil Walikota, Bintang Lima Delux Room	OH	3.000.000,00
19	Kalimantan Barat	Wakil Walikota, Bintang Lima Delux Room	OH	2.400.000,00
20	Kalimantan Selatan	Wakil Walikota, Bintang Lima Delux Room	OH	4.250.000,00
21	Sulawesi Utara	Wakil Walikota, Bintang Lima Delux Room	OH	3.200.000,00
22	Gorontalo	Wakil Walikota, Bintang Lima Delux Room	OH	1.320.000,00
23	Sulawesi Barat	Wakil Walikota, Bintang Lima Delux Room	OH	1.260.000,00
24	Sulawesi Selatan	Wakil Walikota, Bintang Lima Delux Room	OH	4.820.000,00
25	Sulawesi Tengah	Wakil Walikota, Bintang Lima Delux Room	OH	2.030.000,00
26	Sulawesi Tenggara	Wakil Walikota, Bintang Lima Delux Room	OH	1.850.000,00
27	Maluku Utara	Wakil Walikota, Bintang Lima Delux Room	OH	3.110.000,00
28	Papua	Wakil Walikota, Bintang Lima Delux Room	OH	2.850.000,00
29	Irian Barat	Wakil Walikota, Bintang Lima Delux Room	OH	2.750.000,00
	<b>c Biaya Penginapan Dalam Negeri Pejabat Struktural, DPRD dan Eselon II</b>			
	<b>Provinsi Jawa Timur</b>			
1	Ngawi, Magetan, Ponorogo, Kab. Madiun, Nganjuk, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Kediri, Bojonegoro, Tuban, Blitar, Jombang, Mojokerto, Lamongan, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Malang, Batu, Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, Probolinggo, Banyuwangi, Sampang, Bangkalan, Pamekasan, Sumenep	Pejabat Struktural, DPRD dan Eselon II, Bintang IV Delux Room	OH	1.359.000,00

NO.	URAIAN	KLASIFIKASI	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4	5
	<b>Provinsi Jawa Tengah</b>			
2	Sragen, Wonogiri, Solo, Karanganyar, Boyolali, Klaten, Temanggung, Wonosobo, Magelang, Purworejo, Rembang, Kebumen, Pemalang, Semarang, Blora, Pati, Kendal, Kudus, Demak, Jepara, Grobogan, Pekalongan, Tegal, Brebes, Cilacap, Batang, Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga	Pejabat Struktural, DPRD dan Eselon II, Bintang IV Delux Room	OH	1.478.000,00
	<b>Provinsi Di Yogyakarta</b>			
3	Yogyakarta, Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul, Bantul	Pejabat Struktural, DPRD dan Eselon II, Bintang IV Delux Room	OH	1.334.000,00
	<b>Provinsi Jawa Barat</b>			
4	Indramayu, Cirebon, Karawang, Kuningan, Majalengka, Purwakarta, Subang, Ciamis, Tasikmalaya, Cimahi, Bandung, Sumedang, Sukabumi, Garut, Cianjur, Bekasi, Bogor, Depok	Pejabat Struktural, DPRD dan Eselon II, Bintang IV Delux Room	OH	1.753.000,00
	<b>Provinsi Banten</b>			
5	Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang, Cilegon	Pejabat Struktural, DPRD dan Eselon II, Bintang IV Delux Room	OH	1.430.000,00
	<b>Propinsi DKI Jakarta</b>			
7	Jakarta	Pejabat Struktural, DPRD dan Eselon II, Bintang IV Delux Room	OH	1.086.000,00
	<b>Provinsi Luar Pulau Jawa</b>			
8	Nanggroe Aceh Darussalam	Pejabat Struktural, DPRD dan Eselon II, Bintang IV Delux Room	OH	1.308.000,00
9	Sumatra Utara	Pejabat Struktural, DPRD dan Eselon II, Bintang IV Delux Room	OH	1.214.000,00
10	Riau	Pejabat Struktural, DPRD dan Eselon II, Bintang IV Delux Room	OH	1.168.000,00
11	Kepulauan Riau	Pejabat Struktural, DPRD dan Eselon II, Bintang IV Delux Room	OH	1.285.000,00
12	Jambi	Pejabat Struktural, DPRD dan Eselon II, Bintang IV Delux Room	OH	1.176.000,00
13	Sumatra Barat	Pejabat Struktural, DPRD dan Eselon II, Bintang IV Delux Room	OH	1.155.000,00
14	Sumatra Selatan	Pejabat Struktural, DPRD dan Eselon II, Bintang IV Delux Room	OH	1.228.000,00
15	Lampung	Pejabat Struktural, DPRD dan Eselon II, Bintang IV Delux Room	OH	1.299.000,00
16	Bengkulu	Pejabat Struktural, DPRD dan Eselon II, Bintang IV Delux Room	OH	790.000,00
17	Bangka Belitung	Pejabat Struktural, DPRD dan Eselon II, Bintang IV Delux Room	OH	1.310.000,00
18	Bali	Pejabat Struktural, DPRD dan Eselon II, Bintang IV Delux Room	OH	1.810.000,00
19	Nusa Tenggara Barat	Pejabat Struktural, DPRD dan Eselon II, Bintang IV Delux Room	OH	2.738.000,00
20	Nusa Tenggara Timur	Pejabat Struktural, DPRD dan Eselon II, Bintang IV Delux Room	OH	1.000.000,00
21	Kalimantan Barat	Pejabat Struktural, DPRD dan Eselon II, Bintang IV Delux Room	OH	1.130.000,00
22	Kalimantan Tengah	Pejabat Struktural, DPRD dan Eselon II, Bintang IV Delux Room	OH	1.596.000,00
23	Kalimantan Selatan	Pejabat Struktural, DPRD dan Eselon II, Bintang IV Delux Room	OH	1.679.000,00
24	Kalimantan Timur	Pejabat Struktural, DPRD dan Eselon II, Bintang IV Delux Room	OH	3.021.000,00
25	Sulawesi Utara	Pejabat Struktural, DPRD dan Eselon II, Bintang IV Delux Room	OH	1.553.000,00
26	Gorontalo	Pejabat Struktural, DPRD dan Eselon II, Bintang IV Delux Room	OH	1.134.000,00
27	Sulawesi Barat	Pejabat Struktural, DPRD dan Eselon II, Bintang IV Delux Room	OH	1.030.000,00
28	Sulawesi Selatan	Pejabat Struktural, DPRD dan Eselon II, Bintang IV Delux Room	OH	1.912.000,00
29	Sulawesi Tengah	Pejabat Struktural, DPRD dan Eselon II, Bintang IV Delux Room	OH	1.298.000,00
30	Sulawesi Tenggara	Pejabat Struktural, DPRD dan Eselon II, Bintang IV Delux Room	OH	1.070.000,00
31	Maluku	Pejabat Struktural, DPRD dan Eselon II, Bintang IV Delux Room	OH	1.030.000,00
32	Maluku Utara	Pejabat Struktural, DPRD dan Eselon II, Bintang IV Delux Room	OH	1.512.000,00
33	Papua	Pejabat Struktural, DPRD dan Eselon II, Bintang IV Delux Room	OH	1.668.000,00
34	Irian Barat	Pejabat Struktural, DPRD dan Eselon II, Bintang IV Delux Room	OH	1.482.000,00

NO.	URAIAN	KLASIFIKASI	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4	5
<b>d</b>	<b>Blaya Penginapan Dalam Negeri Pejabat Struktural, Eselon III</b>			
	<b>Provinsi Jawa Timur</b>			
1	Ngawi, Magetan, Ponorogo, Kab. Madiun, Nganjuk, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Kediri, Bojonegoro, Tuban, Blitar, Jombang, Mojokerto, Lamongan, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Malang, Batu, Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, Probolinggo, Banyuwangi, Sampang, Bangkalan, Pamekasan, Sumenep	Pejabat Struktural, Eselon III, Bintang III Delux Room	OH	841.000,00
	<b>Provinsi Jawa Tengah</b>			
2	Sragen, Wonogiri, Solo, Karanganyar, Boyolali, Klaten, Temanggung, Wonosobo, Magelang, Purworejo, Rembang, Kebumen, Pemalang, Semarang, Blora, Pati, Kendal, Kudus, Demak, Jepara, Grobogan, Pekalongan, Tegal, Brebes, Cilacap, Batang, Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga	Pejabat Struktural, Eselon III, Bintang III Delux Room	OH	1.024.000,00
	<b>Provinsi DI Yogyakarta</b>			
3	Yogyakarta, Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul, Bantul	Pejabat Struktural, Eselon III, Bintang III Delux Room	OH	747.000,00
	<b>Provinsi Jawa Barat</b>			
4	Indramayu, Cirebon, Karawang, Kuningan, Majalengka, Purwakarta, Subang, Ciamis, Tasikmalaya, Cimahi, Bandung, Sumedang, Sukabumi, Garut, Cianjur, Bekasi, Boor. Depok	Pejabat Struktural, Eselon III, Bintang III Delux Room	OH	949.000,00
	<b>Provinsi Banten</b>			
5	Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang, Cilegon	Pejabat Struktural, Eselon III, Bintang III Delux Room	OH	1.024.000,00
	<b>Propinsi DKI Jakarta</b>			
6	Jakarta	Pejabat Struktural, Eselon III, Bintang III Delux Room	OH	800.000,00
	<b>Provinsi Luar Pulau Jawa</b>			
7	Nanggroe Aceh Darussalam	Pejabat Struktural, Eselon III, Bintang III Delux Room	OH	1.080.000,00
8	Sumatra Utara	Pejabat Struktural, Eselon III, Bintang III Delux Room	OH	703.000,00
9	Riau	Pejabat Struktural, Eselon III, Bintang III Delux Room	OH	868.000,00
10	Kepulauan Riau	Pejabat Struktural, Eselon III, Bintang III Delux Room	OH	650.000,00
11	Jambi	Pejabat Struktural, Eselon III, Bintang III Delux Room	OH	697.000,00
12	Sumatra Barat	Pejabat Struktural, Eselon III, Bintang III Delux Room	OH	884.000,00
13	Sumatra Selatan	Pejabat Struktural, Eselon III, Bintang III Delux Room	OH	605.000,00
14	Lampung	Pejabat Struktural, Eselon III, Bintang III Delux Room	OH	790.000,00
15	Bengkulu	Pejabat Struktural, Eselon III, Bintang III Delux Room	OH	712.000,00
16	Bangka Belitung	Pejabat Struktural, Eselon III, Bintang III Delux Room	OH	850.000,00
17	Bali	Pejabat Struktural, Eselon III, Bintang III Delux Room	OH	1.810.000,00
18	Nusa Tenggara Barat	Pejabat Struktural, Eselon III, Bintang III Delux Room	OH	737.000,00
19	Nusa Tenggara Timur	Pejabat Struktural, Eselon III, Bintang III Delux Room	OH	700.000,00
20	Kalimantan Barat	Pejabat Struktural, Eselon III, Bintang III Delux Room	OH	866.000,00
21	Kalimantan Tengah	Pejabat Struktural, Eselon III, Bintang III Delux Room	OH	923.000,00
22	Kalimantan Selatan	Pejabat Struktural, Eselon III, Bintang III Delux Room	OH	816.000,00
23	Kalimantan Timur	Pejabat Struktural, Eselon III, Bintang III Delux Room	OH	1.596.000,00
24	Sulawesi Utara	Pejabat Struktural, Eselon III, Bintang III Delux Room	OH	640.000,00
25	Gorontalo	Pejabat Struktural, Eselon III, Bintang III Delux Room	OH	910.000,00
26	Sulawesi Barat	Pejabat Struktural, Eselon III, Bintang III Delux Room	OH	910.000,00

NO.	URAIAN	KLASIFIKASI	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4	5
27	Sulawesi Selatan	Pejabat Struktural, Eselon III, Bintang III Delux Room	OH	968.000,00
28	Sulawesi Tengah	Pejabat Struktural, Eselon III, Bintang III Delux Room	OH	894.000,00
29	Sulawesi Tenggara	Pejabat Struktural, Eselon III, Bintang III Delux Room	OH	802.000,00
30	Maluku	Pejabat Struktural, Eselon III, Bintang III Delux Room	OH	680.000,00
31	Maluku Utara	Pejabat Struktural, Eselon III, Bintang III Delux Room	OH	600.000,00
32	Papua	Pejabat Struktural, Eselon III, Bintang III Delux Room	OH	754.000,00
33	Irian Barat	Pejabat Struktural, Eselon III, Bintang III Delux Room	OH	976.000,00
<b>e</b>	<b>Biaya Penginapan Dalam Negeri Pejabat Struktural, Eselon IV dan V</b>			
	<b>Provinsi Jawa Timur</b>			
1	Ngawi, Magetan, Ponorogo, Kab. Madiun, Nganjuk, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Kediri, Bojonegoro, Tuban, Blitar, Jombang, Mojokerto, Lamongan, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Malang, Batu, Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, Probolinggo, Banyuwangi, Sampang, Bangkalan, Pamekasan, Sumenep	Pejabat Struktural, Eselon IV dan V, Bintang III Standar Room	OH	499.000,00
	<b>Provinsi Jawa Tengah</b>			
2	Sragen, Wonogiri, Solo, Karanganyar, Boyolali, Klaten, Temanggung, Wonosobo, Magelang, Purworejo, Rembang, Kebumen, Peralang, Semarang, Blora, Pati, Kendal, Kudus, Demak, Jepara, Grobogan, Pekalongan, Tegal, Brebes, Cilacap, Batang, Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga	Pejabat Struktural, Eselon IV dan V, Bintang III Standar Room	OH	497.000,00
	<b>Provinsi DI Yogyakarta</b>			
3	Yogyakarta, Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul, Bantul	Pejabat Struktural, Eselon IV dan V, Bintang III Standar Room	OH	629.000,00
	<b>Provinsi Jawa Barat</b>			
4	Indramayu, Cirebon, Karawang, Kuningan, Majalengka, Purwakarta, Subang, Ciamis, Tasikmalaya, Cimahi, Bandung, Sumedang, Sukabumi, Garut, Cianjur, Bekasi, Bogor, Depok	Pejabat Struktural, Eselon IV dan V, Bintang III Standar Room	OH	515.000,00
	<b>Provinsi Banten</b>			
5	Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang, Cilegon	Pejabat Struktural, Eselon IV dan V, Bintang III Standar Room	OH	797.000,00
	<b>Propinsi DKI Jakarta</b>			
6	Jakarta	Pejabat Struktural, Eselon IV dan V, Bintang III Standar Room	OH	610.000,00
	<b>Provinsi Luar Pulau Jawa</b>			
7	Nanggroe Aceh Darussalam	Pejabat Struktural, Eselon IV dan V, Bintang III Standar Room	OH	410.000,00
8	Sumatra Utara	Pejabat Struktural, Eselon IV dan V, Bintang III Standar Room	OH	505.000,00
9	Riau	Pejabat Struktural, Eselon IV dan V, Bintang III Standar Room	OH	450.000,00
10	Kepulauan Riau	Pejabat Struktural, Eselon IV dan V, Bintang III Standar Room	OH	502.000,00
11	Jambi	Pejabat Struktural, Eselon IV dan V, Bintang III Standar Room	OH	382.000,00
12	Sumatra Barat	Pejabat Struktural, Eselon IV dan V, Bintang III Standar Room	OH	477.000,00
13	Sumatra Selatan	Pejabat Struktural, Eselon IV dan V, Bintang III Standar Room	OH	514.000,00
14	Lampung	Pejabat Struktural, Eselon IV dan V, Bintang III Standar Room	OH	374.000,00
15	Bengkulu	Pejabat Struktural, Eselon IV dan V, Bintang III Standar Room	OH	599.000,00
16	Bangka Belitung	Pejabat Struktural, Eselon IV dan V, Bintang III Standar Room	OH	533.000,00
17	Bali	Pejabat Struktural, Eselon IV dan V, Bintang III Standar Room	OH	904.000,00
18	Nusa Tenggara Barat	Pejabat Struktural, Eselon IV dan V, Bintang III Standar Room	OH	540.000,00
19	Nusa Tenggara Timur	Pejabat Struktural, Eselon IV dan V, Bintang III Standar Room	OH	662.000,00

NO.	URAIAN	KLASIFIKASI	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4	5
20	Kalimantan Barat	Pejabat Struktural, Eselon IV dan V, Bintang III Standar Room	OH	430.000,00
21	Kalimantan Tengah	Pejabat Struktural, Eselon IV dan V, Bintang III Standar Room	OH	558.000,00
22	Kalimantan Selatan	Pejabat Struktural, Eselon IV dan V, Bintang III Standar Room	OH	500.000,00
23	Kalimantan Timur	Pejabat Struktural, Eselon IV dan V, Bintang III Standar Room	OH	550.000,00
24	Sulawesi Utara	Pejabat Struktural, Eselon IV dan V, Bintang III Standar Room	OH	549.000,00
25	Gorontalo	Pejabat Struktural, Eselon IV dan V, Bintang III Standar Room	OH	423.000,00
26	Sulawesi Barat	Pejabat Struktural, Eselon IV dan V, Bintang III Standar Room	OH	425.000,00
27	Sulawesi Selatan	Pejabat Struktural, Eselon IV dan V, Bintang III Standar Room	OH	539.000,00
28	Sulawesi Tengah	Pejabat Struktural, Eselon IV dan V, Bintang III Standar Room	OH	493.000,00
29	Sulawesi Tenggara	Pejabat Struktural, Eselon IV dan V, Bintang III Standar Room	OH	488.000,00
30	Maluku	Pejabat Struktural, Eselon IV dan V, Bintang III Standar Room	OH	545.000,00
31	Maluku Utara	Pejabat Struktural, Eselon IV dan V, Bintang III Standar Room	OH	478.000,00
32	Papua	Pejabat Struktural, Eselon IV dan V, Bintang III Standar Room	OH	460.000,00
33	Irian Barat	Pejabat Struktural, Eselon IV dan V, Bintang III Standar Room	OH	798.000,00
<b>f</b>	<b>Blaya Penginapan Dalam Negeri Staf / Golongan IV dan III</b>			
	<b>Provinsi Jawa Timur</b>			
1	Ngawi, Magetan, Ponorogo, Kab. Madiun, Nganjuk, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Kediri, Bojonegoro, Tuban, Blitar, Jombang, Mojokerto, Lamongan, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Malang, Batu, Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, Probolinggo, Banyuwangi, Sampang, Bangkalan, Pamekasan, Sumenep	Staf / Golongan IV dan III, Bintang II Standar Room	OH	499.000,00
	<b>Provinsi Jawa Tengah</b>			
2	Sragen, Wonogiri, Solo, Karanganyar, Boyolali, Klaten, Temanggung, Wonosobo, Magelang, Purworejo, Rembang, Kebumen, Pemalang, Semarang, Blora, Pati, Kendal, Kudus, Demak, Jepara, Grobogan, Pekalongan, Tegal, Brebes, Cilacap, Batang, Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga	Pejabat Struktural, Eselon IV dan V, Bintang III Standar Room	OH	497.000,00
	<b>Provinsi DI Yogyakarta</b>			
3	Yogyakarta, Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul, Bantul	Staf / Golongan IV dan III, Bintang II Standar Room	OH	629.000,00
	<b>Provinsi Jawa Barat</b>			
4	Indramayu, Cirebon, Karawang, Kuningan, Majalengka, Purwakarta, Subang, Ciamis, Tasikmalaya, Cimahi, Bandung, Sumedang, Sukabumi, Garut, Cianjur, Bekasi, Bogor, Depok	Staf / Golongan IV dan III, Bintang II Standar Room	OH	515.000,00
	<b>Provinsi Banten</b>			
5	Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang, Cilegon	Staf / Golongan IV dan III, Bintang II Standar Room	OH	797.000,00
	<b>Propinsi DKI Jakarta</b>			
6	Jakarta	Staf / Golongan IV dan III, Bintang II Standar Room	OH	610.000,00
	<b>Provinsi Luar Pulau Jawa</b>			
7	Nanggroe Aceh Darussalam	Staf / Golongan IV dan III, Bintang II Standar Room	OH	410.000,00
8	Sumatra Utara	Staf / Golongan IV dan III, Bintang II Standar Room	OH	505.000,00
9	Riau	Staf / Golongan IV dan III, Bintang II Standar Room	OH	450.000,00
10	Kepulauan Riau	Staf / Golongan IV dan III, Bintang II Standar Room	OH	502.000,00
11	Jambi	Staf / Golongan IV dan III, Bintang II Standar Room	OH	382.000,00
12	Sumatra Barat	Staf / Golongan IV dan III, Bintang II Standar Room	OH	477.000,00

NO.	URAIAN	KLASIFIKASI	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4	5
13	Sumatra Selatan	Staf / Golongan IV dan III, Bintang II Standar Room	OH	514.000,00
14	Lampung	Staf / Golongan IV dan III, Bintang II Standar Room	OH	374.000,00
15	Bengkulu	Staf / Golongan IV dan III, Bintang II Standar Room	OH	599.000,00
16	Bangka Belitung	Staf / Golongan IV dan III, Bintang II Standar Room	OH	533.000,00
17	Bali	Staf / Golongan IV dan III, Bintang II Standar Room	OH	904.000,00
18	Nusa Tenggara Barat	Staf / Golongan IV dan III, Bintang II Standar Room	OH	540.000,00
19	Nusa Tenggara Timur	Staf / Golongan IV dan III, Bintang II Standar Room	OH	662.000,00
20	Kalimantan Barat	Staf / Golongan IV dan III, Bintang II Standar Room	OH	430.000,00
21	Kalimantan Tengah	Staf / Golongan IV dan III, Bintang II Standar Room	OH	558.000,00
22	Kalimantan Selatan	Staf / Golongan IV dan III, Bintang II Standar Room	OH	500.000,00
23	Kalimantan Timur	Staf / Golongan IV dan III, Bintang II Standar Room	OH	550.000,00
24	Sulawesi Utara	Staf / Golongan IV dan III, Bintang II Standar Room	OH	549.000,00
25	Gorontalo	Staf / Golongan IV dan III, Bintang II Standar Room	OH	423.000,00
26	Sulawesi Barat	Staf / Golongan IV dan III, Bintang II Standar Room	OH	425.000,00
27	Sulawesi Selatan	Staf / Golongan IV dan III, Bintang II Standar Room	OH	539.000,00
28	Sulawesi Tengah	Staf / Golongan IV dan III, Bintang II Standar Room	OH	493.000,00
29	Sulawesi Tenggara	Staf / Golongan IV dan III, Bintang II Standar Room	OH	488.000,00
30	Maluku	Staf / Golongan IV dan III, Bintang II Standar Room	OH	545.000,00
31	Maluku Utara	Staf / Golongan IV dan III, Bintang II Standar Room	OH	478.000,00
32	Papua	Staf / Golongan IV dan III, Bintang II Standar Room	OH	460.000,00
33	Irian Barat	Staf / Golongan IV dan III, Bintang II Standar Room	OH	798.000,00
<b>g</b>	<b>Blaya Penginapan Dalam Negeri Staf / Golongan II,I dan PTT</b>			
	<b>Provinsi Jawa Timur</b>			
1	Ngawi, Magetan, Ponorogo, Kab. Madiun, Nganjuk, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Kediri, Bojonegoro, Tuban, Blitar, Jombang, Mojokerto, Lamongan, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Malang, Batu, Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, Probolinggo, Banyuwangi, Sampang, Bangkalan, Pamekasan, Sumenep	Staf / Golongan II,I dan PTT, Bintang I Standar Room	OH	329.000,00
	<b>Provinsi Jawa Tengah</b>			
2	Sragen, Wonogiri, Solo, Karanganyar, Boyolali, Klaten, Temanggung, Wonosobo, Magelang, Purworejo, Rembang, Kebumen, Peralang, Semarang, Blora, Pati, Kendal, Kudus, Demak, Jepara, Grobogan, Pekalongan, Tegal, Brebes, Cilacap, Batang, Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga	Staf / Golongan II,I dan PTT, Bintang I Standar Room	OH	350.000,00
	<b>Provinsi DI Yogyakarta</b>			
3	Yogyakarta, Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul, Bantul	Staf / Golongan II,I dan PTT, Bintang I Standar Room	OH	461.000,00
	<b>Provinsi Jawa Barat</b>			
4	Indramayu, Cirebon, Karawang, Kuningan, Majalengka, Purwakarta, Subang, Ciamis, Tasikmalaya, Cimahi, Bandung, Sumedang, Sukabumi, Garut, Cianjur, Bekasi, Bogor, Depok	Staf / Golongan II,I dan PTT, Bintang I Standar Room	OH	463.000,00
	<b>Provinsi Banten</b>			
5	Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang, Cilegon	Staf / Golongan II,I dan PTT, Bintang I Standar Room	OH	400.000,00
	<b>Propinsi DKI Jakarta</b>			
6	Jakarta	Staf / Golongan II,I dan PTT, Bintang I Standar Room	OH	400.000,00

NO.	URAIAN	KLASIFIKASI	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4	5
	<b>Provinsi Luar Pulau Jawa</b>			
7	Nanggroe Aceh Darussalam	Staf / Golongan II,I dan PTT, Bintang I Standar Room	OH	370.000,00
8	Sumatra Utara	Staf / Golongan II,I dan PTT, Bintang I Standar Room	OH	310.000,00
9	Riau	Staf / Golongan II,I dan PTT, Bintang I Standar Room	OH	380.000,00
10	Kepulauan Riau	Staf / Golongan II,I dan PTT, Bintang I Standar Room	OH	280.000,00
11	Jambi	Staf / Golongan II,I dan PTT, Bintang I Standar Room	OH	290.000,00
12	Sumatra Barat	Staf / Golongan II,I dan PTT, Bintang I Standar Room	OH	370.000,00
13	Sumatra Selatan	Staf / Golongan II,I dan PTT, Bintang I Standar Room	OH	310.000,00
14	Lampung	Staf / Golongan II,I dan PTT, Bintang I Standar Room	OH	356.000,00
15	Bengkulu	Staf / Golongan II,I dan PTT, Bintang I Standar Room	OH	510.000,00
16	Bangka Belitung	Staf / Golongan II,I dan PTT, Bintang I Standar Room	OH	304.000,00
17	Bali	Staf / Golongan II,I dan PTT, Bintang I Standar Room	OH	658.000,00
18	Nusa Tenggara Barat	Staf / Golongan II,I dan PTT, Bintang I Standar Room	OH	360.000,00
19	Nusa Tenggara Timur	Staf / Golongan II,I dan PTT, Bintang I Standar Room	OH	400.000,00
20	Kalimantan Barat	Staf / Golongan II,I dan PTT, Bintang I Standar Room	OH	361.000,00
21	Kalimantan Tengah	Staf / Golongan II,I dan PTT, Bintang I Standar Room	OH	436.000,00
22	Kalimantan Selatan	Staf / Golongan II,I dan PTT, Bintang I Standar Room	OH	379.000,00
23	Kalimantan Timur	Staf / Golongan II,I dan PTT, Bintang I Standar Room	OH	450.000,00
24	Sulawesi Utara	Staf / Golongan II,I dan PTT, Bintang I Standar Room	OH	342.000,00
25	Gorontalo	Staf / Golongan II,I dan PTT, Bintang I Standar Room	OH	240.000,00
26	Sulawesi Barat	Staf / Golongan II,I dan PTT, Bintang I Standar Room	OH	360.000,00
27	Sulawesi Selatan	Staf / Golongan II,I dan PTT, Bintang I Standar Room	OH	378.000,00
28	Sulawesi Tengah	Staf / Golongan II,I dan PTT, Bintang I Standar Room	OH	389.000,00
29	Sulawesi Tenggara	Staf / Golongan II,I dan PTT, Bintang I Standar Room	OH	420.000,00
30	Maluku	Staf / Golongan II,I dan PTT, Bintang I Standar Room	OH	414.000,00
31	Maluku Utara	Staf / Golongan II,I dan PTT, Bintang I Standar Room	OH	380.000,00
32	Papua	Staf / Golongan II,I dan PTT, Bintang I Standar Room	OH	414.000,00
33	Irian Barat	Staf / Golongan II,I dan PTT, Bintang I Standar Room	OH	370.000,00
<b>18.7</b>	<b>DAFTAR BESARAN UANG REPRESENTASI</b>			
<b>a</b>	<b>Daftar Besaran Uang Representasi Walikota dan Wakil Walikota</b>			
	<b>Provinsi Jawa Timur</b>			
1	Ngawi, Magetan, Ponorogo, Kab. Madiun, Nganjuk, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Kediri, Bojonegoro, Tuban, Blitar, Jombang, Mojokerto, Lamongan, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Malang, Batu, Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, Probolinggo, Banyuwangi, Sampang, Bangkalan, Pamekasan, Sumenep	Walikota dan Wakil Walikota	OH	250.000,00
	<b>Provinsi Jawa Tengah</b>			
2	Sragen, Wonogiri, Solo, Karanganyar, Boyolali, Klaten, Temanggung, Wonosobo, Magelang, Purworejo, Rembang, Kebumen, Pematang, Semarang, Blora, Pati, Kendal, Kudus, Demak, Jepara, Grobogan, Pekalongan, Tegal, Brebes, Cilacap, Batang, Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga	Walikota dan Wakil Walikota	OH	250.000,00
	<b>Provinsi DI Yogyakarta</b>			
3	Yogyakarta, Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul, Bantul	Walikota dan Wakil Walikota	OH	250.000,00

NO.	URAIAN	KLASIFIKASI	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4	5
	<b>Provinsi Jawa Barat</b>			
4	Indramayu, Cirebon, Karawang, Kuningan, Majalengka, Purwakarta, Subang, Ciamis, Tasikmalaya, Cimahi, Bandung, Sumedang, Sukabumi, Garut, Cianjur, Bekasi, Bogor, Depok	Walikota dan Wakil Walikota	OH	250.000,00
	<b>Provinsi Banten</b>			
5	Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang, Cilegon	Walikota dan Wakil Walikota	OH	250.000,00
	<b>Propinsi DKI Jakarta</b>			
6	Jakarta	Walikota dan Wakil Walikota	OH	250.000,00
	<b>Provinsi Luar Pulau Jawa</b>			
7	Luar Jawa	Walikota dan Wakil Walikota	OH	250.000,00
<b>b</b>	<b>Daftar Besaran Uang Representasi Ketua Wakil Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Eselon IIb</b>			
	<b>Provinsi Jawa Timur</b>			
1	Ngawi, Magetan, Ponorogo, Kab. Madiun, Nganjuk, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Kediri, Bojonegoro, Tuban, Blitar, Jombang, Mojokerto, Lamongan, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Malang, Batu, Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, Probolinggo, Banyuwangi, Sampang, Bangkalan, Pamekasan, Sumenep	Ketua Wakil Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Eselon IIb	OH	150.000,00
	<b>Provinsi Jawa Tengah</b>			
2	Sragen, Wonogiri, Solo, Karanganyar, Boyolali, Klaten, Temanggung, Wonosobo, Magelang, Purworejo, Rembang, Kebumen, Pemalang, Semarang, Blora, Pati, Kendal, Kudus, Demak, Jepara, Grobogan, Pekalongan, Tegal, Brebes, Cilacap, Batang, Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga	Ketua Wakil Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Eselon IIb	OH	150.000,00
	<b>Provinsi DI Yogyakarta</b>			
3	Yogyakarta, Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul, Bantul	Ketua Wakil Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Eselon IIb	OH	150.000,00
	<b>Provinsi Jawa Barat</b>			
4	Indramayu, Cirebon, Karawang, Kuningan, Majalengka, Purwakarta, Subang, Ciamis, Tasikmalaya, Cimahi, Bandung, Sumedang, Sukabumi, Garut, Cianjur, Bekasi, Bogor, Depok	Ketua Wakil Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Eselon IIb	OH	150.000,00
	<b>Provinsi Banten</b>			
5	Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang, Cilegon	Ketua Wakil Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Eselon IIb	OH	150.000,00
	<b>Propinsi DKI Jakarta</b>			
6	Jakarta	Ketua Wakil Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Eselon IIb	OH	150.000,00
	<b>Provinsi Luar Pulau Jawa</b>			
7	Luar Jawa	Ketua Wakil Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Eselon IIb	OH	150.000,00
<b>18.8</b>	<b>BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI</b>			
1	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri	A c e h	Orang/Kali	123.000,00
2	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Sumatera Utara	Orang/Kali	232.000,00
3	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri	R i a u	Orang/Kali	70.000,00
4	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Kepulauan Riau	Orang/Kali	105.000,00
5	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri	J a m b i	Orang/Kali	128.000,00
6	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Sumatera Barat	Orang/Kali	192.000,00
7	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Sumatera Selatan	Orang/Kali	124.000,00
8	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Lampung	Orang/Kali	148.000,00
9	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Bengkulu	Orang/Kali	92.000,00



NO.	URAIAN	KLASIFIKASI	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4	5
10	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Bangka Belitung	Orang/Kali	86.000,00
11	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri	B a n t e n	Orang/Kali	320.000,00
12	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Jawa Barat	Orang/Kali	118.000,00
13	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri	D.K.I. Jakarta	Orang/Kali	170.000,00
14	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Jawa Tengah	Orang/Kali	50.000,00
15	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri	D.I. Yogyakarta	Orang/Kali	141.000,00
16	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Jawa Timur	Orang/Kali	148.000,00
17	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri	B a l i	Orang/Kali	160.000,00
18	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	218.000,00
19	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	81.000,00
20	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Kalimantan Barat	Orang/Kali	145.000,00
21	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	94.000,00
22	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	141.000,00
23	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Kalimantan Timur	Orang/Kali	401.000,00
24	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Kalimantan Utara	Orang/Kali	353.000,00
25	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Sulawesi Utara	Orang/Kali	310.000,00
26	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Gorontalo	Orang/Kali	134.000,00
27	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Sulawesi Barat	Orang/Kali	217.000,00
28	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	128.000,00
29	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	151.000,00
30	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	332.000,00
31	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri	M a l u k u	Orang/Kali	340.000,00
32	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Maluku Utara	Orang/Kali	403.000,00
33	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri	P a p u a	Orang/Kali	354.000,00
34	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Papua Barat	Orang/Kali	130.000,00
<b>18.9</b>	<b>BIAYA SEWA KENDARAAN DALAM KOTA</b>			
1	Biaya Sewa Kendaraan Dalam Kota	A c e h	Per Hari	3.500.000,00
2	Biaya Sewa Kendaraan Dalam Kota	Sumatera Utara	Per Hari	3.500.000,00
3	Biaya Sewa Kendaraan Dalam Kota	R i a u	Per Hari	3.500.000,00
4	Biaya Sewa Kendaraan Dalam Kota	Kepulauan Riau	Per Hari	3.500.000,00
5	Biaya Sewa Kendaraan Dalam Kota	J a m b i	Per Hari	3.500.000,00
6	Biaya Sewa Kendaraan Dalam Kota	Sumatera Barat	Per Hari	3.500.000,00
7	Biaya Sewa Kendaraan Dalam Kota	Sumatera Selatan	Per Hari	3.500.000,00
8	Biaya Sewa Kendaraan Dalam Kota	Lampung	Per Hari	3.500.000,00
9	Biaya Sewa Kendaraan Dalam Kota	Bengkulu	Per Hari	3.500.000,00
10	Biaya Sewa Kendaraan Dalam Kota	Bangka Belitung	Per Hari	3.500.000,00
11	Biaya Sewa Kendaraan Dalam Kota	B a n t e n	Per Hari	3.500.000,00
12	Biaya Sewa Kendaraan Dalam Kota	Jawa Barat	Per Hari	3.500.000,00
13	Biaya Sewa Kendaraan Dalam Kota	D.K.I. Jakarta	Per Hari	3.500.000,00
14	Biaya Sewa Kendaraan Dalam Kota	Jawa Tengah	Per Hari	3.500.000,00
15	Biaya Sewa Kendaraan Dalam Kota	D.I. Yogyakarta	Per Hari	3.500.000,00
16	Biaya Sewa Kendaraan Dalam Kota	Jawa Timur	Per Hari	3.500.000,00
17	Biaya Sewa Kendaraan Dalam Kota	B a l i	Per Hari	3.500.000,00
18	Biaya Sewa Kendaraan Dalam Kota	Nusa Tenggara Barat	Per Hari	3.500.000,00
19	Biaya Sewa Kendaraan Dalam Kota	Nusa Tenggara Timur	Per Hari	3.500.000,00
20	Biaya Sewa Kendaraan Dalam Kota	Kalimantan Barat	Per Hari	3.500.000,00
21	Biaya Sewa Kendaraan Dalam Kota	Kalimantan Tengah	Per Hari	3.500.000,00
22	Biaya Sewa Kendaraan Dalam Kota	Kalimantan Selatan	Per Hari	3.500.000,00
23	Biaya Sewa Kendaraan Dalam Kota	Kalimantan Timur	Per Hari	3.500.000,00
24	Biaya Sewa Kendaraan Dalam Kota	Kalimantan Utara	Per Hari	3.500.000,00
25	Biaya Sewa Kendaraan Dalam Kota	Sulawesi Utara	Per Hari	3.500.000,00
26	Biaya Sewa Kendaraan Dalam Kota	Gorontalo	Per Hari	3.500.000,00
27	Biaya Sewa Kendaraan Dalam Kota	Sulawesi Barat	Per Hari	3.500.000,00
28	Biaya Sewa Kendaraan Dalam Kota	Sulawesi Selatan	Per Hari	3.500.000,00
29	Biaya Sewa Kendaraan Dalam Kota	Sulawesi Tengah	Per Hari	3.500.000,00
30	Biaya Sewa Kendaraan Dalam Kota	Sulawesi Tenggara	Per Hari	3.500.000,00

NO.	URAIAN	KLASIFIKASI	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4	5
31	Biaya Sewa Kendaraan Dalam Kota	Maluku	Per Hari	3.500.000,00
32	Biaya Sewa Kendaraan Dalam Kota	Maluku Utara	Per Hari	3.500.000,00
33	Biaya Sewa Kendaraan Dalam Kota	Papua	Per Hari	3.500.000,00
34	Biaya Sewa Kendaraan Dalam Kota	Papua Barat	Per Hari	3.500.000,00
<b>18.10</b>	<b>BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH</b>			
	<b>Biaya Pemetician Jenazah</b>			
1	Biaya Pemetician Jenazah	Walikota		5.000.000,00
2	Biaya Pemetician Jenazah	Wakil Walikota		4.500.000,00
3	Biaya Pemetician Jenazah	Sekretaris Daerah/Ketua DPRD		4.500.000,00
4	Biaya Pemetician Jenazah	Eselon II b		3.000.000,00
5	Biaya Pemetician Jenazah	Wakil Ketua / Anggota DPRD		3.000.000,00
6	Biaya Pemetician Jenazah	Eselon III, IV, V dan Golongan IV		2.500.000,00
7	Biaya Pemetician Jenazah	Staf Golongan III, II, I dan Pegawai Tidak Tetap		2.000.000,00
	<b>Biaya Angkutan Jenazah</b>			
1	Biaya Angkutan Jenazah	Walikota		500.000,00
2	Biaya Angkutan Jenazah	Wakil Walikota		450.000,00
3	Biaya Angkutan Jenazah	Sekretaris Daerah/Ketua DPRD		400.000,00
4	Biaya Angkutan Jenazah	Eselon II b		350.000,00
5	Biaya Angkutan Jenazah	Wakil Ketua / Anggota DPRD		300.000,00
7	Biaya Angkutan Jenazah	Staf Golongan III, II, I dan Pegawai Tidak Tetap		200.000,00

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM.**

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. WALIKOTA MADIUN

SEKRETARIS DAERAH

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



**BUDI WIBOWO, SH**

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001

**LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA MADIUN**  
**NOMOR : TAHUN 2016**  
**TANGGAL : \_\_\_\_\_**

**SBK TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	URAIAN	KLASIFIKASI	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4	5
1	<b>HONORARIUM KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN</b>			
1.1	<b>KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)</b>	<b>Bagian Organisasi</b>		
a	Honorarium Penyusun Laporan Tahunan SPM SKPD		OK	500.000,00
1.2	<b>KEGIATAN PEMBINAAN KELOMPOK BUDAYA KERJA</b>	<b>Bagian Organisasi</b>		
a	Honorarium Penyusun Risalah Budaya Kerja		OK	250.000,00
1.3	<b>KEGIATAN EVALUASI DAN PELAPORAN PERCEPATAN PENERAPAN SPM</b> <b>Honorarium Tim Percepatan Penerapan dan Pencapaian SPM</b>	<b>Bagian Organisasi</b>		
a	Pelindung		OK	2.000.000,00
b	Pembina		OK	1.500.000,00
c	Ketua		OK	1.400.000,00
d	Sekretaris		OK	1.200.000,00
e	Anggota		OK	1.000.000,00
1.4	<b>Honorarium Tim Sekretariat Percepatan Penerapan dan Pencapaian SPM</b>			
a	Ketua		OK	1.000.000,00
b	Anggota		OK	750.000,00
c	Honorarium Penyusun Laporan SPM SKPD		OK	500.000,00
1.5	<b>KEGIATAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN (SP)</b>	<b>Bagian Organisasi</b>		
a	Honorarium Penyusun Dokumen SP SKPD		OK	250.000,00
1.6	<b>KEGIATAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</b>	<b>Bagian Organisasi</b>		
a	Honorarium Penyusun Dokumen SOP SKPD		OK	500.000,00
1.7	<b>KEGIATAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Bagian Organisasi</b>		
a	Honorarium Penyusun Proposal Inovasi Pelayanan Publik		OK	200.000,00
2	<b>HONORARIUM TIM TEKNIS BERBAGAI KEGIATAN</b>			
2.1	<b>HONORARIUM TIM TEKNIS PENYUSUNAN APBD, PERUBAHAN APBD, DAN PERTANGGUNG JAWABAN APBD</b>	<b>BPKAD</b>		
a	Ketua		OK	8.000.000,00
b	Koordinator Inti		OK	7.000.000,00
c	Koordinator Pendukung		OK	2.000.000,00
d	Anggota Inti		OK	5.000.000,00
e	Anggota Pendukung		OK	1.000.000,00
2.1	<b>KEGIATAN RENCANA AKSI DAERAH DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI</b> <b>Honorarium Tim Koordinasi</b>	<b>Bagian Administrasi Pemerintahan Umum</b>		
a	Pelindung		OK	5.000.000,00
b	Pembina		OK	3.000.000,00
c	Ketua		OK	2.500.000,00
d	Pelaksana Harian		OK	2.000.000,00
e	Sekretaris		OK	1.500.000,00
f	Anggota		OK	1.000.000,00
	<b>Honorarium Tim Penyusun</b>			
a	Ketua		OK	1.000.000,00
b	Sekretaris		OK	750.000,00
c	Anggota		OK	500.000,00
2.2	<b>KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN LKPJ WALIKOTA MADIUN</b> <b>Honorarium Tim Perumus</b>	<b>Bagian Administrasi Pemerintahan umum</b>		
a	Pelindung		OK	5.000.000,00
b	Pembina		OK	3.000.000,00
c	Penanggung Jawab		OK	2.500.000,00
d	Ketua		OK	2.000.000,00
e	Wakil Ketua		OK	1.750.000,00
f	Sekretaris		OK	1.500.000,00
g	Anggota		OK	1.000.000,00

NO	URAIAN	KLASIFIKASI	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4	5
	<b>Honorarium Sekretariat Tim</b>			
a	Koordinator		OK	2.000.000,00
b	Verifikator Teknis		OK	1.500.000,00
c	Anggota		OK	1.000.000,00
<b>2.3</b>	<b>Honorarium Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional</b>	<b>Dinas Kesehatan dan KB</b>		
a	Ketua dan Wakil Ketua Tim		OK	1.200.000,00
b	Sekretaris Tim dan Wakil Sekretaris		OK	1.000.000,00
c	Anggota Tim		OK	1.000.000,00
<b>2.4</b>	<b>Honorarium Tim Perencana Obat Terpadu</b>	<b>Dinas Kesehatan dan KB</b>		
a	Penanggung Jawab		OK	1.200.000,00
b	Ketua dan Wakil Ketua Tim		OK	1.000.000,00
c	Sekretaris		OK	900.000,00
d	Anggota		OK	800.000,00
<b>2.5</b>	<b>Honorarium Tim Pemeriksaan obat dan perbekalan kesehatan kadaluarsa / rusak</b>	<b>Dinas Kesehatan dan KB</b>		
a	Ketua		OK	750.000,00
b	Anggota		OK	500.000,00
<b>2.6</b>	<b>Honorarium Tim Pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan kadaluarsa / rusak</b>	<b>Dinas Kesehatan dan KB</b>		
a	Ketua		OK	1.000.000,00
b	Anggota		OK	750.000,00
<b>2.7</b>	<b>HONORARIUM KEGIATAN KESEHATAN KHUSUS PETUGAS JAGA HARI RAYA</b>			
a	Medis / Paramedis		OH	150.000,00
b	Petugas Loker / Pengemudi / Penjaja		OH	100.000,00
c	Tenaga Penunjang (Oksigen/Loundry/Cleaning Service)		OH	75.000,00
d	Honorarium Petugas Bimbingan Rohani Pasien		OK	100.000,00
e	Honorarium Penjaja Pasien T4		OH	50.000,00
f	Biaya Pemakaman Jenazah Terlantar		OK	750.000,00
<b>2.8</b>	<b>Honorarium Tim Verifikasi RKA/RKPA/DPA/DPPA</b>	<b>BPKAD</b>		
a	Ketua		OK	4.000.000,00
b	Koordinator Inti		OK	3.500.000,00
c	Koordinator Pendukung		OK	3.000.000,00
d	Anggota Inti		OK	2.500.000,00
e	Anggota Pendukung		OK	1.000.000,00
<b>2.9</b>	<b>Honorarium Tim Teknis Verifikasi RENJA, Pra-RKA, Pra-RKPA</b>	<b>Bappeda</b>		
a	Ketua		OK	1.750.000,00
b	Koordinator Inti		OK	2.000.000,00
c	Koordinator Pendukung		OK	1.500.000,00
d	Anggota Inti		OK	1.250.000,00
e	Anggota Pendukung		OK	1.000.000,00
<b>2.10</b>	<b>Kegiatan Cetak Masal dan Penyampaian SPPT</b>	<b>Badan Pendapatan Daerah</b>		
	<b>Honorarium Tim :</b>			
a	Ketua Tim		OK	750.000,00
b	Koordinator Kecamatan		OK	600.000,00
c	Koordinator UST		OK	600.000,00
d	Koordinator Cetak Masal		OK	600.000,00
e	Koordinator Hasil Cetakan		OK	600.000,00
f	Koordinator Distribusi SPPT		OK	600.000,00
g	Operator Console		OK	500.000,00
h	Petugas Pemilah SPPT dan DHKP		OK	200.000,00
i	Koordinator Wilayah Kelurahan		OK	300.000,00
j	Petugas Penyampai SPPT		OK	200.000,00
k	Petugas Cap tanda Tangan		OK	200.000,00
<b>2.11</b>	<b>Kegiatan Pelayanan Perpajakan Daerah di Tempat Pelayanan Pajak Daerah Terpadu</b>	<b>Badan Pendapatan Daerah</b>		
	<b>Honorarium Tim :</b>			
a	Ketua Tim		OB	500.000,00
b	Koordinator TPPD		OB	400.000,00
c	Koordinator Penerbitan dan Ketetapan		OB	400.000,00
d	Koordinator Peneliti dan Verifikasi		OB	400.000,00
e	Koordinator Petugas Loker		OB	400.000,00
f	Petugas Konsultasi		OB	400.000,00
g	Operator Console		OB	350.000,00
h	Petugas Loker		OB	350.000,00
i	Petugas Peneliti		OB	350.000,00
j	Staf Administrasi		OB	350.000,00
k	Petugas Keamanan		OB	250.000,00

NO	URAIAN	KLASIFIKASI	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4	5
2.12	<b>Kegiatan Sosialisasi dan Penyebarluasan Informasi Perbaiki Daerah Honorarium Tim :</b>	<b>Badan Pendapatan Daerah</b>		
a	Pembuat Materi Iklan		OK	150.000,00
b	Ketua Pertemuan Sosialisasi		OK	350.000,00
c	Koordinator Pertemuan Sosialisasi		OK	300.000,00
2.13	<b>Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Daerah Honorarium Tim :</b>	<b>Badan Pendapatan Daerah</b>		
a	Penanggung Jawab		OK	3.000.000,00
b	Ketua		OK	2.000.000,00
c	Koordinator		OK	1.500.000,00
d	Petugas Analisa Data		OK	1.500.000,00
e	Petugas Peneliti Lapangan		OK	1.000.000,00
2.14	<b>KEGIATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI Honorarium Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi</b>	<b>Bagian Organisasi</b>		
a	Koordinator Pokja		OK	1.500.000,00
b	Ketua Pokja		OK	250.000,00
c	Anggota Pokja		OK	150.000,00
3	<b>HONORARIUM PENGELOLAAN SIM DAN MEDIA</b>			
3.1	<b>KEGIATAN PENERBITAN TABLOID PROGRAM PEMERINTAH</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>		
a	Honorarium Redaktur		O/edisi	1.000.000,00
b	Honorarium Editor / Verifikasi		O/edisi	500.000,00
c	Layout		O/edisi	500.000,00
d	Administrator		O/edisi	400.000,00
e	Pengali Informasi		O/Peliputan	100.000,00
f	Pengisi Artikel		O/Artikel	100.000,00
h	Photografer		O/Peliputan	100.000,00
3.2	<b>KEGIATAN OPTIMALISASI PPID</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>		
a	Honorarium Redaktur		OB	1.000.000,00
b	Honorarium Editor / Verifikasi		OB	500.000,00
c	Administrator		OB	400.000,00
d	Pengisi Artikel		OB	100.000,00
e	PPID Pembantu		OB	200.000,00
f	Petugas Front Office dan Website		OB	400.000,00
3.3	<b>Hr. Pengelola SIK</b>	<b>Dinas Kesehatan dan KB</b>		
a	Dinkes		OB	200.000,00
b	Puskesmas		OB	150.000,00
3.4	<b>Honorarium Pengelola Website Informasi Manajemen</b>	<b>Bagian Organisasi</b>		
a	Redaktur Website Pemkot		OB	450.000,00
b	Verifikator dan Editor Berita Website Pemkot		OB	400.000,00
c	Administrator Website Resmi Pemkot		OB	350.000,00
d	Desainer Website Pemkot		OB	300.000,00
e	Pengentri Berita Website Resmi Pemkot		O/Terbitan	50.000,00
f	Pembuat Artikel Berita Website Pemkot		O/Terbitan	100.000,00
4	<b>HONORARIUM PENGELOLA LPSE INFORMASI MANAJEMEN</b>	<b>Bagian Organisasi</b>		
a	Koordinator		OB	500.000,00
b	Helpdesk LPSE		OB	250.000,00
c	Verifikator LPSE		OB	250.000,00
d	Trainer LPSE		OB	150.000,00
e	Administrator Jaringan LPSE		OB	450.000,00
f	Administrator LPSE		OB	450.000,00
5	<b>HONORARIUM UMUM USULAN SKPD</b>			
5.1	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>Dispendukcapil</b>		
a	Arsiparis Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil		OB	300.000,00
b	Petugas Perekaman KTP EL		OB	300.000,00
5.2	<b>Hr. Dokter Pendamping Intership</b>	<b>Dinas Kesehatan dan KB</b>		
a	Puskesmas		OB	200.000,00
5.3	<b>Upah Tenaga Pengelolaan Program HIV / AIDS</b>			
a	Dinkes		OB	2.000.000,00
5.4	<b>Upah Verifikator Jamkesmasta</b>	<b>Dinas Kesehatan dan KB</b>		
a	Dinkes		OB	2.000.000,00
5.5	<b>Upah Kader Penemu ( TB(+), HIV / AIDS, Kusta, AFP )</b>	<b>Dinas Kesehatan dan KB</b>		

NO	URAIAN	KLASIFIKASI	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4	5
a	Puskesmas		Kasus	100.000,00
5.6	<b>Upah Tenaga Penyemprot ( Fogging dan Lalat )</b>	<b>Dinas Kesehatan dan KB</b>		
a	Dinkes		OK	100.000,00
5.7	<b>Upah Tenaga Cuci</b>	<b>Dinas Kesehatan dan KB</b>		
a	Puskesmas		OB	250.000,00
5.7	<b>Pengamanan Kesehatan (P3K) kecuali jaga Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Kegiatan pertandingan Olah Raga di berikan 2 kali dari standart biaya</b> <b>Honorarium Tim :</b> <b>Jam Kerja :</b>	<b>Dinas Kesehatan dan KB</b>		
a	Dokter		OK	75.000,00
b	Perawat		OK	50.000,00
c	Driver / Tenaga Umum		OK	40.000,00
	<b>Diluar jam kerja :</b>			
a	Dokter		OK	100.000,00
b	Perawat		OK	75.000,00
c	Driver / Tenaga Umum		OK	60.000,00
5.8	<b>Kegiatan Prolanis</b>	<b>Dinas Kesehatan dan KB</b>		
a	Hr. Penyuluh lainnya		OK	200.000,00
b	Upah Instruktur Senam		OK	100.000,00
5.9	<b>Hr. Distributor Obat</b>	<b>Dinas Kesehatan dan KB</b>		
a	GFK		OK	75.000,00
5.10	<b>Honor Siaran Keliling</b>			
a	Petugas Siaran		OK	150.000,00
6	<b>KEGIATAN FASILITASI PERKEMBANGAN KERAGAMAN BUDAYA DAERAH BUDAYA DAERAH</b>	<b>Bagian Umum</b>		
a	Honorarium Pelatih Paskibraka		OH	150.000,00
b	Honorarium DANKI / DANTON Paskibraka		OH	100.000,00
c	Honorarium Paskibraka		OH	50.000,00
d	Honorarium PPI		OH	75.000,00
e	Honorarium Pembicara / Pemberi Materi Paskibraka		OK	300.000,00
7	<b>KEGIATAN PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA KELENGKAPANNYA</b>	<b>Bagian Umum</b>		
a	Honorarium Petugas Distribusi		OK	1.500.000,00
8	<b>HONORARIUM TIM TEKNIS INSPEKTORAT</b>			
8.1	<b>Honorarium Tim Teknis Pengawasan dan Tindak Lanjut (Steering Committee)</b>	<b>Inspektorat</b>		
a	Pelindung		OK	5.000.000,00
b	Pengarah		OK	3.000.000,00
c	Pembina		OK	2.500.000,00
8.2	<b>Honorarium Tim Teknis Pengawasan (Steering Committee)</b>	<b>Inspektorat</b>		
a	Penanggungjawab (SKPD Besar - 10 Hari)		OP	1.000.000,00
b	Pengendali Teknis (SKPD Besar - 10 Hari)		OP	1.500.000,00
c	Ketua Tim (SKPD Besar - 10 Hari)		OP	1.200.000,00
d	Anggota (SKPD Besar - 10 Hari)		OP	800.000,00
e	Penanggungjawab (SKPD Besar - 7 Hari)		OP	800.000,00
f	Pengendali Teknis (SKPD Besar - 7 Hari)		OP	1.200.000,00
g	Ketua Tim (SKPD Besar - 7 Hari)		OP	900.000,00
h	Anggota (SKPD Besar - 7 Hari)		OP	700.000,00
i	Penanggungjawab (SKPD Besar - 5 Hari)		OP	600.000,00
j	Pengendali Teknis (SKPD Besar - 5 Hari)		OP	1.000.000,00
k	Ketua Tim (SKPD Besar - 5 Hari)		OP	700.000,00
l	Anggota (SKPD Besar - 5 Hari)		OP	500.000,00
8.3	<b>Honorarium Tim Teknis Tidak Lanjut (Operating Committee)</b>	<b>Inspektorat</b>		
a	Penanggungjawab		OP	750.000,00
b	Pengendali Teknis		OP	500.000,00
c	Ketua Tim		OP	350.000,00
d	Anggota		OP	250.000,00
9	<b>HONORARIUM PANITIA PENGHAPUSAN , PENAKSIR DAN LELANG TERBATAS ASET DAERAH</b>			
9.1	<b>Honorarium Panitia Penghapusan Aset Daerah</b>	<b>BPKAD</b>		
a	Ketua		OK	3.000.000,00

NO	URAIAN	KLASIFIKASI	SATUAN	BIAYA
	2	3	4	5
1			OK	2.500.000,00
b	Sekretaris		OK	1.500.000,00
c	Anggota Tetap		OK	750.000,00
d	Anggota Tidak Tetap			
9.2	<b>Honorarium Panitia Penaksir/ Penilai Aset Daerah</b>	<b>BPKAD</b>		
			OK	3.000.000,00
a	Ketua		OK	2.500.000,00
b	Sekretaris		OK	1.500.000,00
c	Anggota			
9.3	<b>Honorarium Panitia Lelang Terbatas/ Umum Aset Daerah</b>	<b>BPKAD</b>		
			OK	3.000.000,00
a	Ketua		OK	2.500.000,00
b	Sekretaris		OK	1.500.000,00
c	Anggota			
10	<b>HONORARIUM VERIFIKASI DOKUMEN TEKNIS KONSTRUKSI</b>	<b>DINAS PU DAN TATA RUANG</b>		
10.1	<b>Verifikasi Dokumen Teknis Konstruksi</b>			
a	Verifikator RAB dan Gambar Teknis Konstruksi	s/d Rp. 50.000.000	Dokumen	300.000,00
b	Verifikator RAB dan Gambar Teknis Konstruksi	di atas Rp. 50.000.000 - Rp. 100.000.000	Dokumen	500.000,00
c	Verifikator RAB dan Gambar Teknis Konstruksi	di atas Rp. 100.000.000 - Rp. 200.000.000	Dokumen	600.000,00
d	Verifikator RAB dan Gambar Teknis Konstruksi	di atas Rp. 200.000.000 - Rp. 500.000.000	Dokumen	800.000,00
e	Verifikator RAB dan Gambar Teknis Konstruksi	di atas Rp. 500.000.000 - Rp. 1.000.000.000	Dokumen	1.000.000,00
f	Verifikator RAB dan Gambar Teknis Konstruksi	di atas Rp. 1.000.000.000 - Rp. 2.500.000.000	Dokumen	1.200.000,00
g	Verifikator RAB dan Gambar Teknis Konstruksi	di atas Rp. 2.500.000.000 - Rp. 5.000.000.000	Dokumen	1.500.000,00
h	Verifikator RAB dan Gambar Teknis Konstruksi	di atas Rp. 5.000.000.000 - Rp. 10.000.000.000	Dokumen	1.700.000,00
i	Verifikator RAB dan Gambar Teknis Konstruksi	di atas Rp. 10.000.000.000	Dokumen	2.000.000,00

**Catatan :**

1. Nilai tersebut merupakan pekerjaan 1 paket dokumen.
2. Honorarium sudah termasuk honor penanggungjawab gambar.

11	<b>HONORARIUM TIM HARMONISASI PENYUSUNAN RAPERDA</b>	<b>BAGIAN HUKUM</b>		
11.1	<b>Tim Harmonisasi Penyusunan Raperda</b>			
a	Pelindung		OR	4.000.000
b	Pembina		OR	3.800.000
c	Ketua		OR	3.700.000
d	Wakil Ketua I		OR	3.600.000
e	Wakil Ketua II		OR	3.500.000
f	Sekretaris		OR	3.400.000
g	Wakil Sekretaris		OR	3.200.000
h	Anggota		OR	3.000.000
i	Pelaksana		OR	2.750.000
11.2	<b>Sekretariat Tim Harmonisasi Penyusunan Raperda</b>			
a	Koordinator		OR	2.750.000
b	Anggota		OR	2.000.000
c	anggota staf		OR	1.750.000
	<b>Catatan :</b> OR = Oranq/Raperda			
12	<b>HONORARIUM TIM PEMBAHASAN PERATURAN WALIKOTA</b>	<b>BAGIAN HUKUM</b>		
12.1	<b>Tim PEMBAHASAN PERWAL</b>			
a	Penanggung Jawab		OP	1.500.000
b	Pembina		OP	1.300.000
c	Ketua		OP	1.250.000
d	Wakil Ketua I		OP	1.200.000
e	Wakil Ketua II		OP	1.100.000
f	Sekretaris		OP	1.000.000
g	Wakil Sekretaris		OP	800.000
h	Anggota		OP	700.000
i	Pelaksana		OP	500.000
12.2	<b>Sekretariat Tim Pembahasan Peraturan Walikota</b>			
a	Koordinator		OP	500.000
b	Anggota		OP	400.000
c	anggota staf		OP	300.000
	<b>Catatan :</b> OP = Oranq/Peraturan Walikota			
13	<b>HONORARIUM TIM PENYUSUNAN PROPEMPERDA</b>	<b>BAGIAN HUKUM</b>		
13.1	<b>Tim PENYUSUNAN PROPEMPERDA</b>			
a	Pelindung		OK	2.500.000
b	Pembina		OK	2.400.000

NO	URAIAN	KLASIFIKASI	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4	5
c	Ketua		OK	2.250.000
d	Wakil Ketua		OK	2.200.000
e	Sekretaris		OK	2.000.000
f	Wakil Sekretaris		OK	1.750.000
g	Anggota		OK	1.500.000
h	Pelaksana		OK	1.250.000
<b>13.2</b>	<b>Sekretariat Tim Penyusunan Propemperda</b>			
a	Koordinator (Kabag)		OK	1.250.000
b	Anggota (kasubag)		OK	1.000.000
c	anggota staf		OK	750.000
<b>14</b>	<b>HONORARIUM TIM PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>BAGIAN HUKUM</b>		
<b>14.1</b>	<b>Penyusunan Buku Peraturan Perundang-undangan dan Buku Produk Hukum Daerah</b>			
a	Penanggung Jawab		OK	2.500.000,00
b	Ketua		OK	2.300.000,00
c	Sekretaris		OK	2.000.000,00
d	Koordinator		OK	1.800.000,00
e	Anggota Teknis		OK	1.500.000,00
f	Anggota Non Teknis		OK	1.300.000,00
<b>14.2</b>	<b>Penggandaan Lembaran Lepas Perda</b>			
a	Penanggung Jawab		OK	1.500.000,00
b	Ketua		OK	1.300.000,00
c	Sekretaris		OK	1.000.000,00
d	Koordinator		OK	900.000,00
e	Anggota Teknis		OK	800.000,00
f	Anggota Non Teknis		OK	600.000,00
<b>15</b>	<b>HONORARIUM SIDANG DAN PENDAMPINGAN SAKSI</b>	<b>BAGIAN HUKUM</b>		
a	Ketua		OA	750.000
b	Koordinator		OA	600.000
c	Anggota		OA	500.000
<b>16</b>	<b>HONORARIUM TIM PENYULUHAN HUKUM (STEERING COMITE)</b>	<b>BAGIAN HUKUM</b>		
a	Pelindung		OK	8.000.000
b	Penasehat		OK	7.000.000
c	Pembina		OK	6.000.000
d	Penanggung Jawab		OK	5.000.000
<b>17</b>	<b>HONORARIUM SEKRETARIAT TIM PENYULUHAN HUKUM DAN PEMBINAAN KADARKUM</b>	<b>BAGIAN HUKUM</b>		
a	Narasumber		OA	750.000
b	Ketua		OA	750.000
c	Wakil Ketua		OA	650.000
d	Koordinator		OA	550.000
e	Anggota Teknis		OA	500.000
f	Anggota Non Teknis		OA	400.000
	<b>Catatan :</b> OA = Orang/Acara			

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM.

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
SEKRETARIS DAERAH

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



BUDHI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001